



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Palembang, 12 Maret 2026

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197506171995011001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS KOPERASI & UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ditujukan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada para pemangku kepentingan atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2025. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara objektif dan transparan serta mengungkapkan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Semoga LKIP Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dalam mengevaluasi kinerjanya dan dapat menjadi masukan maupun umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Palembang, Februari 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19660509 199203 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Faktor Keberhasilan Pelayanan dan pencapaian kinerja yang melampaui target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Pemberdayaan dan Bimbingan Teknis:** Program bimbingan teknis yang terstruktur dan pendampingan yang intensif kepada para pelaku UMKM dan koperasi berperan penting dalam peningkatan kapasitas mereka. Hal ini terlihat dari keberhasilan peningkatan jumlah UMKM dan Koperasi Aktif.
- **Manajemen Profesional dan Partisipasi Aktif:** Adanya pengurus koperasi yang memahami manajemen usaha, serta partisipasi aktif anggota (solidaritas dan keterlibatan), meningkatkan kinerja koperasi.
- **Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja:** Penyusunan laporan kinerja yang akuntabel (SAKIP), penetapan indikator yang jelas (IKU), serta evaluasi rutin terhadap efektivitas program kerja, memungkinkan dinas mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan dengan cepat.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan ke depan, sebagai berikut:

- **Rendahnya Kualitas dan Partisipasi Anggota Koperasi:** Banyak koperasi yang terdaftar belum aktif beroperasi secara maksimal, dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah.
- **Minimnya Modal Usaha dan Akses Pembiayaan:** Koperasi dan pelaku UKM sering kali kesulitan dalam permodalan untuk mengembangkan usaha.
- **Tantangan Manajemen Data UMKM:** Pengelolaan dan analisis data UMKM yang masih sering menggunakan pendekatan konvensional (misalnya Excel), menyebabkan perumusan kebijakan pembinaan kurang responsif.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan UKM. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan UKM
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan UKM
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan UKM
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan UKM, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan menyusun 2 (dua) dokumen perjanjian kinerja, yaitu perjanjian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 – 2026 dan perjanjian kinerja perubahan yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja utama dan 7 target kinerja yang harus dicapai. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama dan 3 target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 indikator;

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta Penyediaan Makan dan Minum	%	3,93	4,06	103%
	Meningkatkan Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	%	3,0	2,96	98%
	Rasio Kewirausahaan	%	3,14	3,09	98%
Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	5	7,42	148%
	Persentase Koperasi Aktif	%	66,2	61	92%
	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi	%	16	60,73	379%

- Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Rasio Kewirausahaan	%	2,57	2,89	112%
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,41	0,30	73%
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,53	0,44	83%

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar **Rp.15.338.717.956,-** (*lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*). Dinas juga mendapat alokasi APBN Dana Dekonsentrasi melalui Program Perkoperasian sebesar **Rp.25.553.254.000,-** (*dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*), yang terbagi dalam 8 (delapan) program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan UMKM
3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
4. Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Tugas Pokok, Struktur Organisasi, Fungsi dan Peta Proses Bisnis	4
1.3.1 Tugas Pokok	4
1.3.2 Struktur Organisasi	5
1.3.3 Fungsi	6
1.3.4 Peta Proses Bisnis	6
1.4 Sumber Daya	7
1.4.1 Sumber Daya Manusia	7
1.4.2 Sarana dan Prasarana	10
1.4.3 Dukungan Anggaran	11
1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
1.5.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi	12
1.5.2 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM	12
1.5.3 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan	13
1.5.4 Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah	14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	14
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan ..	22
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	23
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	29
3.2.1 Rasio kewirausahaan	30
3.2.2 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Provinsi ..	34
3.2.3 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	40
3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	49
3.2.5 Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran	51
3.2.6 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja	52
3.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	53
3.2.8 Analisis Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	58
3.2.9 Analisis Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Periode RENSTRA	60
3.3 Realisasi Anggaran	63

BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Tinjauan Keberhasilan	75
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	76
4.4 Rekomendasi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN dan PPPK Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	8
Tabel 1. 2	Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang	9
Tabel 1. 3	Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan	9
Tabel 1. 4	Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	10
Tabel 1. 5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Desember 2025	10
Tabel 1. 6	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	15
Tabel 2. 1	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	22
Tabel 2. 2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	23
Tabel 2. 3	Keterkaitan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	23
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	26
Tabel 2. 5	Dukungan Program dan Anggaran	26
Tabel 3. 1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3. 2	Jumlah UMKM per Wilayah per Skala Usaha di Sumatera Selatan.....	31
Tabel 3. 3	Tabel Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	31
Tabel 3. 4	Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	32
Tabel 3. 5	Tabel Perbandingan Target Renstra 2025-2030 dan Realisasi Kinerja.....	32
Tabel 3. 6	Tabel Perbandingan Realisasi SUMSEL dan Realisasi Nasional.....	33
Tabel 3. 7	Tabel Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 8	Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya	36
Tabel 3. 9	Tabel Perbandingan Target Renstra 2025-2030 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	36
Tabel 3. 10	Tabel Perbandingan Realisasi SUMSEL dan Realisasi Nasional.....	37
Tabel 3. 11	Jumlah UMKM per Sektor dan Skala Usaha di Sumatera Selatan	39
Tabel 3. 12	Tabel Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	40
Tabel 3. 13	Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya	41
Tabel 3. 14	Tabel Perbandingan Target Renstra 2025-2030 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	41
Tabel 3. 15	Tabel Perbandingan Realisasi SUMSEL dan Realisasi Nasional.....	42
Tabel 3. 16	Rekap Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Tahun 2025	44
Tabel 3. 17	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Sumatera Selatan.....	46
Tabel 3. 18	Volume Usaha Koperasi di Sumatera Selatan	47
Tabel 3. 19	Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Tiap Program.....	50
Tabel 3. 20	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2025.....	56
Tabel 3. 21	Perbandingan Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	59
Tabel 3. 22	Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Terhadap IKU Pada Renstra.....	61
Tabel 3. 23	Rekapitulasi Realisasi Anggaran APBD.....	64
Tabel 3. 24	Rekapitulasi Realisasi Anggaran APBN.....	64
Tabel 3. 25	Perubahan Anggaran APBD 2025	65
Tabel 3. 26	Realisasi Anggaran tiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	66
Tabel 3. 27	Realisasi Anggaran tiap Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2025 Satker Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	74
Tabel 4. 1	Ketercapaian target dan realisasi	75
Tabel 4. 2	Rekomendasi Peningkatan Kinerja	77

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 1. 3 Jumlah ASN dan PPPK Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 2. 1 Pohon Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan</i>	<i>27</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pembangunan selalu ada perubahan yang digerakan secara langsung maupun tidak langsung oleh bermacam upaya pembaharuan kearah kemajuan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang, hasil dan manfaatnya telah dapat dinikmati. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Perekonomian yang tidak mempunyai daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis global dan akan tersisih dari persaingan serta akan mengalami kemunduran. Karena itu meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi, menjadi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang.

Dengan memperhatikan masalah dan tantangan tersebut, maka agenda yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka pendek adalah meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan agar dapat menghadapi persaingan yang semakin keras dalam era globalisasi yang terus bergerak dan tak terhindarkan.

Dalam konteks pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senantiasa melakukan pembaharuan di berbagai bidang untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan efisiensi menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, agenda strategis Dinas Koperasi dan UKM diarahkan pada pemberdayaan pilar ekonomi kerakyatan, yaitu Lembaga Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menjadi landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sinergi pembangunan ini mengacu pada **Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029**, yaitu: **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"**. Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yakni,

- (1). Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
- (2). **Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.**

- (3). Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
- (4). Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- (5). Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.**
- (6). Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
- (7). Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi tersebut, **Dinas Koperasi dan UKM** Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran dan tanggung jawab dalam **mengampu:**

- **Misi ke-2:** Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- **Misi ke-5:** Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, Dinas Koperasi dan UKM menetapkan **Tujuan Strategis 2025-2029**, yaitu: **"Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian"**. Tujuan ini selaras dengan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan untuk menciptakan perekonomian yang inklusif dan dinamis. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, Rasio Kewirausahaan, serta proporsi pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah non-pertanian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan empat **Sasaran Strategis** sebagai langkah konkret pelayanan dan pembangunan selama lima tahun ke depan:

1. **Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah:** Fokus pada peningkatan jumlah wirausaha baru melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan regulasi yang kondusif guna memperluas lapangan kerja.
2. **Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan:** Mendorong UMKM untuk naik kelas (*scale-up*) sehingga lebih berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial.
3. **Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi:** Mewujudkan koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui prinsip *Good Cooperative Governance* sebagai pilar ketahanan ekonomi akar rumput.
4. **Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Mengedepankan Akuntabilitas:** Sebagai fondasi internal untuk memastikan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima, dengan parameter utama nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Melalui pelaksanaan program yang terpadu dan sinergis, diharapkan seluruh target kinerja dapat tercapai demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan keinginan di atas tidaklah mudah, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka segala persoalan yang dihadapi akan dapat ditanggulangi. Namun suatu hal yang lebih penting lagi adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi seperti Lembaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan,
2. Mendorong Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat,
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kinerjanya. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tugas Pokok, Struktur Organisasi, Fungsi dan Peta Proses Bisnis

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dalam ketentuan turunannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

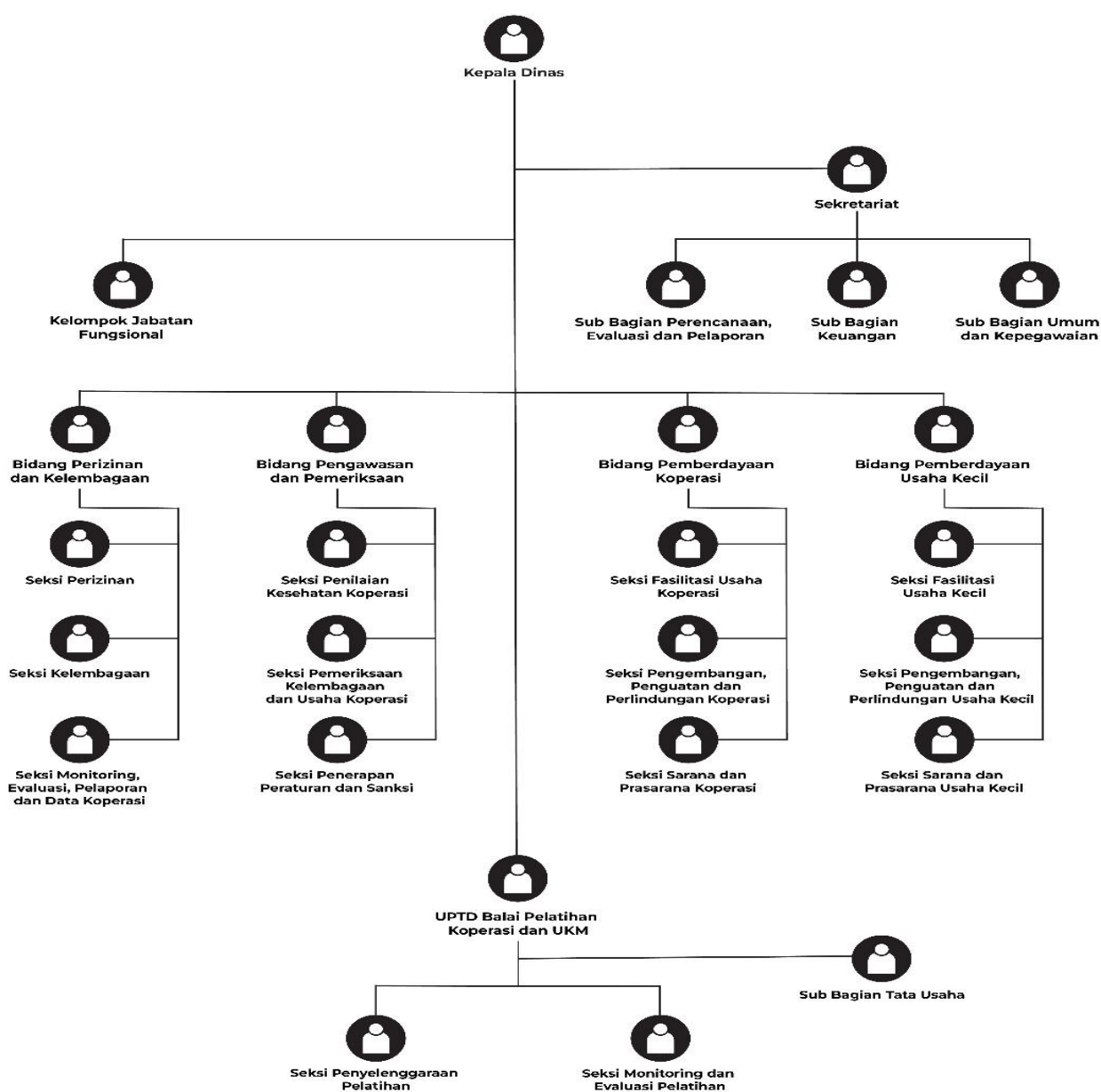
1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sementara, UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang penelitian perkoperasian usaha kecil dan menengah.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, di mana tipologi Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan Tipe A yang mempunyai unit kerja terdiri dari satu sekretariat paling banyak 3 sub bagian, 4 Bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 seksi, dan 1 UPTD dengan 3 sub bagian dapat dilihat pada struktur organisasi pada **Error! Reference source not found.**

Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



1.3.3 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan
2. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis;
3. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
5. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. Pengkoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

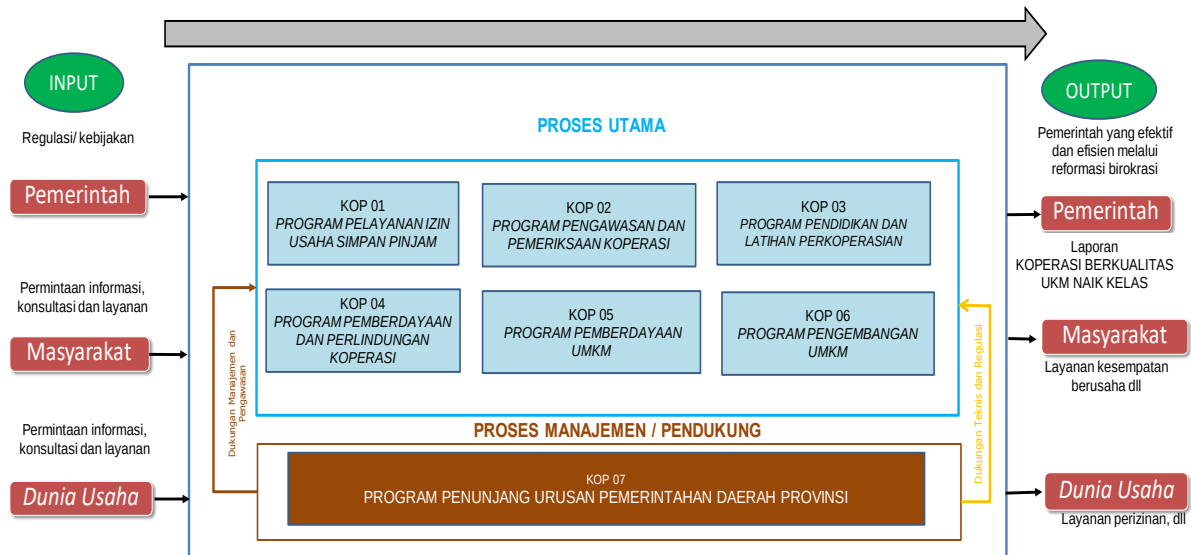
UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program kerja;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
3. Penyusunan penyelenggaraan kegiatan program kerja;
4. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait;
6. Pelaksanaan pelatihan, studi banding dan magang koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. Pelaksanaan monitoring evaluasi program kerja;
8. Pelaksanaan pengendalian intern;
9. Pemberian petunjuk dan pembagian tugas kepala subbagian, kepala seksi, pelaksana dan fungsional;
10. Pelaksanaan penilaian sasaran kinerja kepala subbagian, kepala seksi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.4 Peta Proses Bisnis

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dimandatkan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program teknis pemberdayaan KUMKM dengan dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Proses Bisnis pada Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



1.4 Sumber Daya

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat terbentuknya pemerintahan yang efektif. Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah kecerdasan SDM Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dalam pelaksanaan program saat ini hingga masa mendatang karena keberadaan sumber daya aparatur akan menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan per Desember 2025, jumlah total pegawai adalah 101 orang, yang terdiri dari 45 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau 45% dari total pegawai, serta 56 orang PPPK atau 55% dari total pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Di kalangan ASN, 84% memiliki pendidikan perguruan tinggi yang terdiri atas 20 orang bergelar S2 (44%), 18 orang bergelar S1 (40%), dan tidak ada yang berpendidikan D3. Sebanyak 18% ASN lainnya berasal dari jenjang pendidikan non-perguruan tinggi, dengan rincian 5 orang lulusan SMA/SMK (11%), 1 orang lulusan SMP (2%), dan 1 orang lulusan SD (2%). Di sisi lain, pada kelompok PPPK, 66% memiliki pendidikan perguruan tinggi dengan, 35 orang bergelar S1 (63%), dan 2 orang lulusan D3 (4%). Sisanya, sebanyak 34% Non-ASN berasal dari jenjang pendidikan non-perguruan tinggi, yang terdiri atas 17 orang lulusan SMA/SMK (30%) dan 2 orang lulusan SMP (4%), tanpa ada yang berasal dari jenjang SD.

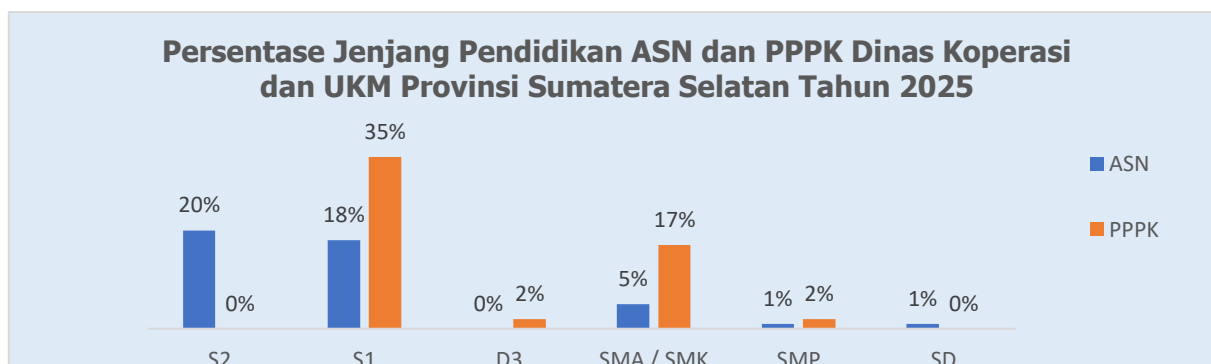
Dari segi distribusi gender, jumlah pegawai perempuan lebih dominan dengan 53 orang atau 52% dari total pegawai, sementara jumlah pegawai laki-laki sebanyak 48 orang atau 48%. Komposisi ini menunjukkan keberagaman dan potensi kesetaraan gender yang baik di lingkungan kerja. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dominasi pegawai dengan pendidikan tinggi, baik pada ASN maupun PPPK, serta adanya peran signifikan

pegawai perempuan dalam mendukung operasional organisasi. Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah ASN dan PPPK Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	PNS					PPPK				
		Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN	Persentase terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap PPPK	Persentase terhadap Seluruh Pegawai
		L	P	Total			L	P	Total		
A	Perguruan Tinggi	18	20	38	84%	38%	15	22	37	66%	37%
1	S2	7	13	20	44%	20%	0	0	0	0%	0%
2	S1	11	7	18	40%	18%	14	21	35	63%	35%
3	D3	0	0	0	0%	0%	1	1	2	4%	2%
B	Bukan Perguruan Tinggi	6	1	7	16%	7%	9	10	19	34%	19%
4	SMA / SMK	4	1	5	11%	5%	8	9	17	30%	17%
5	SMP	1	0	1	2%	1%	1	1	2	4%	2%
6	SD	1	0	1	2%	1%	0	0	0	0%	0%
Jumlah		24	21	45	100%	45%	24	32	56	100%	55%
Jumlah Seluruh Pegawai		101									

Gambar 1. 3 Jumlah ASN dan PPPK Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Selanjutnya, berdasarkan golongan/ruang, mayoritas ASN berada di Golongan III dengan total 27 orang atau 60% dari seluruh ASN. Di dalamnya, terdapat 16 orang pada sub-golongan III/d (36%), 6 orang pada sub-golongan III/c (13%), 4 orang pada sub-golongan III/b (9%), dan 1 orang pada sub-golongan III/a (2%). Selanjutnya, ASN di Golongan IV berjumlah 13 orang atau 29%. Rinciannya, 9 orang berada di sub-golongan IV/a (20%), 3 orang di IV/b (7%), serta masing-masing 1 orang di IV/c dan IV/d (2%). Pada Golongan II, terdapat 2 orang ASN atau 4% dari total ASN, terdiri atas 2 orang di sub-golongan II/d (4%), tanpa ASN di sub-golongan II/bc, II/b dan II/a. Sementara itu, Golongan I memiliki 2 orang ASN atau 4% dari total, yang semuanya berada di sub-golongan I/d.

Distribusi ini menunjukkan konsentrasi ASN berada di golongan menengah (III), yang mendominasi struktur kepegawaian instansi. Data ini dapat menjadi acuan dalam merencanakan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia sesuai golongan di masa mendatang, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai			Persentase terhadap ASN
		L	P	Total	
1	Golongan IV	5	9	14	31%
a	IV/d	1	0	1	2%
b	IV/c	1	0	1	2%
c	IV/b	1	2	3	7%
d	IV/a	2	7	9	20%
2	Golongan III	15	12	27	60%
a	III/d	8	8	16	36%
b	III/c	4	2	6	13%
c	III/b	2	2	4	9%
d	III/a	1	0	1	2%
3	Golongan II	2	0	2	4%
a	II/d	2	0	2	4%
b	II/c	0	0	0	0%
c	II/b	0	0	0	0%
d	II/a	0	0	0	0%
4	Golongan I	2	0	2	4%
a	I/d	2	0	2	4%
b	I/c	0	0	0	0%
c	I/b	0	0	0	0%
d	I/a	0	0	0	0%
JUMLAH		24	21	45	100%

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari total 45 pegawai yang ada, sebanyak 2% menempati posisi Eselon II.a, yang merupakan tingkat kepemimpinan tertinggi dalam struktur organisasi. Selanjutnya, terdapat 13% pegawai yang berada pada tingkat Eselon III, dengan rincian 11% di Eselon III.a dan 2% di Eselon III.b. Sementara itu, sebanyak 33% pegawai menduduki jabatan Eselon IV.a, yang bertanggung jawab dalam operasional harian instansi. Selain itu, terdapat 2% pegawai yang menempati Jabatan Fungsional Tertentu. Kelompok terbesar dalam struktur organisasi ini adalah pegawai pelaksana, yang mencapai 49% dari total pegawai. Komposisi ini mencerminkan proporsi tenaga kerja yang didominasi oleh pegawai pada level pelaksana dan struktural tingkat menengah, yang berperan penting dalam mendukung jalannya program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlihat pada **Error! Reference source not found. 1.3**

Tabel 1. 3 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN
		L	P	Total	
1	Eselon II.a	1	0	1	2%
2	Eselon III	0	0	0	0%
	- Eselon III.a	2	3	5	11%
	- Eselon III.b	1	0	1	2%
3	Eselon IV.a	6	9	15	33%
4	Jabatan Fungsional Keahlian (Pustakawan)	0	1	1	2%
5	Pelaksana	14	8	22	49%
JUMLAH		24	21	45	100%

Adapun dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, sebanyak 42% dari total ASN telah mendapatkan pelatihan kepemimpinan. Dari jumlah tersebut, 22% telah mengikuti Diklat Administrasi Umum (ADUM), Diklat PIM IV, atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), yang berfokus pada pengembangan kompetensi kepemimpinan di tingkat pengawas. Selanjutnya, sebanyak 16% pegawai telah menyelesaikan Diklat SPAMA, Diklat PIM III, atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), yang ditujukan bagi pejabat administrator untuk meningkatkan kemampuan manajerial. Sementara itu, 4% pegawai telah mengikuti Diklat SPAMEN, Diklat PIM II, atau Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), yang diperuntukkan bagi pejabat struktural tingkat tinggi untuk memperkuat strategi kepemimpinan di lingkungan pemerintahan. Komposisi ini mencerminkan bahwa hampir setengah dari total ASN di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan pembekalan kepemimpinan, yang menjadi modal penting dalam peningkatan kinerja dan efektivitas organisasi., dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.4

Tabel 1. 4 Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN
		L	P	Total	
1	ADUM/ Diklat PIM IV/PKP	3	7	10	22%
2	SPAMA/Diklat PIM III/PKA	3	4	7	16%
3	SPAMEN/Diklat PIM II/PKN	2	0	2	4%
Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat		8	11	19	42%
Jumlah Seluruh Pegawai		24	21	45	100%

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdiri di atas lahan seluas 2.375 m² berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 No. 565 Palembang dengan asal usul tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mendukung operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan fasilitas seperti peralatan kantor, perlengkapan kerja, komputer, meubelair, perangkat komunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana, Perlengkapan dan Aset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1.5

Tabel 1. 5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Sampai Desember 2025

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	1	Baik
2	02.02.01.01.005	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Baik
3	02.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	2	Baik
4	02.05.01.04.007	Brandkas	1	Baik
5	02.05.01.05.052	Pintu Elektrik (yang Memakai kunci otomatis)	1	Baik
6	02.05.02.01.048	Sofa	1	Baik
7	02.05.02.06.002	Televisi	1	Baik
8	02.05.02.06.008	Sound System	1	Baik
9	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	1	Baik
10	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	1	Baik
11	02.05.03.06.010	Kursi Tamu di Ruangannya Tunggu	1	Baik

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
12	02.06.01.01.005	Audio Amplifier	1	Baik
13	02.06.01.02.126	Camera Digital	1	Baik
14	02.06.02.01.010	Facsimile	1	Baik
15	02.10.01.02.009	Tablet PC	1	Baik
16	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	Baik
17	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2	Baik
18	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	3	Baik
19	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2	Baik
20	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	2	Baik
21	02.05.02.01.008	Meja Rapat	4	Baik
22	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	3	Baik
23	02.06.02.01.004	Telephone Mobile	3	Baik
24	02.05.02.04.001	Lemari Es	4	Baik
25	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
26	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	19	Baik
27	02.05.02.01.032	Kursi Putar	8	Baik
28	02.10.01.02.003	Note Book	8	Baik
29	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	12	Baik
30	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	10	Baik
31	02.05.02.06.038	Dispenser	10	Baik
32	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	6	Baik
33	02.10.01.02.002	Lap Top	13	Baik
34	02.10.01.02.001	P.C Unit	14	Baik
35	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	19	Baik
36	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Baik
37	02.05.02.04.004	A.C. Split	37	Baik
38	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	78	Baik
39	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	90	Baik
40	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	138	Baik
41	1.5.3.01.001.005.001	Website/ Marketplace	1	Baik
42	1.5.3.01.001.005.001	Website/market place	1	Baik
43	1.3.2.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	40	Baik
44	1.3.02.05.02.01.008	Meja Rapat Costum	14	Baik
45	1.3.2.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	Baik

1.4.3 Dukungan Anggaran

Pada Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan didukung dana APBD sebesar **Rp.15.338.717.956,-** (*lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*).

Dinas juga mendapat alokasi APBN Dana Dekonsentrasi melalui Program Perkoperasian sebesar **Rp.25.553.254.000,-** (*dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi terhadap permasalahan yang mempengaruhi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan telah dirumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Rendahnya jumlah koperasi berkualitas di Sumatera Selatan diawali dengan sedikitnya koperasi yang menerapkan tata Kelola usahanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya. Permasalahan besar koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
 - b. Kaum muda (millenials) sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi yang berdampak pada tata kelola koperasi yang sulit mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan.
2. Kelembagaan
 - a. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal sebab masih didominasi koperasi simpan pinjam (credit union);
 - b. Koperasi akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait;
 - c. Koperasi masih dianggap sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum dipandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pembiayaan

Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

1.5.2 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61,07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 14,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan hanya 22,48%.
- b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi.
- c. Tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.

2. Produksi dan Pemasaran

- a. Jumlah produk UMKM ekspor masih sangat sedikit disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
- b. Kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).
- c. Masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara online.
- d. Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya.

3. Pembiayaan

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Di sisi lain, jasa pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Kelembagaan

Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat dominan yakni mencapai 98,68%.

1.5.3 Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan

Peringkat wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, berdasarkan Global Entrepreneurship Index 2019 (GEI) Indonesia masih menempati peringkat ke-75 dari 137 negara. Indeks Entrepreneurship Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia peringkat 43, Brunei Darussalam peringkat 53, Thailand peringkat 54, dan Vietnam 73. Selain itu, rasio kewirausahaan Indonesia tahun 2020 baru sekitar 3,47%, angka ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Thailand sebesar 4,26 persen serta Malaysia yakni 4,74 persen.

Beberapa permasalahan kewirausahaan di Indonesia dimana bahwa sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dinilai masih rendah seiring dengan rendahnya literasi kewirausahaan sejak usia dini. Selain itu, ekosistem untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan belum menjadi sub sistem yang terbangun di tengah masyarakat khususnya pelaku usaha. Beberapa pihak banyak yang melakukan pelatihan, pendampingan dan dukungan ekspor namun dilakukan secara sporadis, belum adanya keterhubungan dan sinergi kewirausahaan melalui inkubator, pendekatan ekosistem yang utuh.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan skala usaha, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang

memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial budaya di perkotaan maupun perdesaan.

1.5.4 Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMM juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan UKM kurang optimal untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum selaras dengan struktur organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai,
2. Indikator Kinerja di setiap bidang kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART) sehingga berdampak pada aktivitas kegiatan pada masing-masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan OPD,
3. Terbatasnya jumlah SDM di OPD yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM. Dan dari jumlah SDM yang adapun, kapasitas aparatur yang menguasai substansi Koperasi, UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan masih sangat rendah.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas, hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi,
2. Peningkatan akses pembiayaan & kemitraan koperasi,
3. Peningkatan upaya pembaharuan koperasi,
4. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi,
5. Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif,
6. Peningkatan usaha yang bertransformasi dari informal ke formal,
7. Terwujudnya pemberdayaan UMKM yang efektif, dan
8. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Saran/Rekomendasi dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam LHE SAKIP No. 700/45/ITDAPROV.IV/2026 Tanggal 26 Januri 2026 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah ditindaklanjuti dengan uraian sebagaimana tabel 1.6 berikut:

Tabel 1. 6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Langkah Kerja	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link G-Drive (https://bit.ly/TL-LHE-SAKIP2024)
1	Seluruh pegawai wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai serta menerapkan SOP Monitoring dan Evaluasi agar selaras dengan perjanjian kinerja unit kerja;	1. Menyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai perjanjian kinerja unit kerja	1.Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melakukan sinkornisasi SKP Pegawai dengan PK 3.Melakukan ceklist/rekapitulasi daftar pengumpulan SKP	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1vVPmTyL8H_IU30XeYzBwDoLi4C_GzDfDV?usp=sharing
		2. Penerapan SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja secara berkala	1.Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Kasubbag Umum & Kepegawaian		
		3. Penguatan Tanggung Jawab Kolektif keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi	1. Menyeebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melakukan sinkornisasi SKP Pegawai dengan PK	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
		4.Rutinasi Evaluasi Kinerja terhadap implementasi SKP dan Monev	1. Menyeebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Seluruh bidang/UPTD		
2	Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin guna menghasilkan laporan capaian, identifikasi hambatan, serta langkah tindak lanjut peningkatan tanggung jawab kolektif;	1. Menyusun jadwal evaluasi kinerja rutin (bulanan/triwulanan)	1. Menyeebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1-jhC7ykW5jPHmn0xr1s-MIZwoHVTdLY?usp=drive_link
		2.Melaksanakan monitoring capaian kinerja terhadap target	1. Menyeebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
		3.Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program/kegiatan	1. Menyeebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Seluruh bidang/UPTD		
		4.Melaksanakan rapat tindak lanjut evaluasi kinerja Monitoring & Evaluasi Lanjutan	1. Menyeebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		

No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Langkah Kerja	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link G-Drive (https://bit.ly/TL-LHE-SAKIP2024)
3	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta penjelasan indikator yang mendukung Perencanaan dan menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai;	1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen perencanaan 2. Penyusunan definisi operasional dan penjelasan Indikator 3. Mekanisme monitoring & Evaluasi berkala atas kesesuaian dan efektivitas IKU 4. Penetapan IKU secara formal melalui dokumen resmi	1. Membentuk tim penyusunan IKU 2. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 3. Melakukan ceklist/rekapitulasi daftar pengumpulan SKP 1. Menghimpun daftar indikator kinerja utama 2. Penetapan pengesahan dokumen SK IKU 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring secara berkala 1. Menghimpun daftar indikator kinerja utama 2. Penetapan pengesahan dokumen SK IKU	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Seluruh bidang/UPTD Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1CKL1d5jbmqqUQL5j49IwDGGCvhvmtre?usp=sharing
4	Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian organisasi (refocusing);	1. Pemanfaatan Hasil Analisis hasil pengukuran kinerja unit kerja 2. Penyesuaian Organisasi Penyusunan rekomendasi refocusing berbasis kinerja 3. Monitoring & Evaluasi Refocusing 4. Sosialisasi dan koordinasi internal terkait penyesuaian organisasi	1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Analisis monitoring roadmap anggaran 3. Menghimpun daftar roadmap anggaran 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Analisis monitoring roadmap anggaran 3. Menghimpun daftar roadmap anggaran 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Analisis monitoring roadmap anggaran 3. Menghimpun daftar roadmap anggaran 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Analisis monitoring roadmap anggaran 3. Menghimpun daftar roadmap anggaran	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Seluruh bidang/UPTD Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XFHkno3tbxw5sgyicBWdrRZPZINmoyb?usp=sharing
5	Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas	1. Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara	1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring	Seluruh bidang/UPTD	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1s_pWTV2xb4s-ZdqKORpAZxKr-

No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Langkah Kerja	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link G-Drive (https://bit.ly/TL-LHE-SAKIP2024)
	hasil pengukuran kinerja pegawai;	triwulan	secara berkala			rRZ6W2b?usp=sharing
		2.Melaksanakan rapat evaluasi kinerja pegawai secara berkala	1. Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Seluruh bidang/UPTD		
		3.Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	1. Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Seluruh bidang/UPTD		
6	Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja;	1. Mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja ke dalam proses perencanaan anggaran	1. Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Analisis monitoring roadmap anggaran 3.Menghimpun daftar roadmap anggaran	Sekretaris Dinas		https://drive.google.com/drive/folders/1s_pWTV2xb4s-ZdqKORpAZxKr-rRZ6W2b?usp=sharing
		2. Memperkuat koordinasi perencanaan dan penganggaran antar bidang/unit	1. Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Seluruh bidang/UPTD	Selesai	
		3.Menyusun anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting)	1. Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Analisis monitoring roadmap anggaran 3.Menghimpun daftar roadmap anggaran	Seluruh bidang/UPTD		
		4. Menetapkan prioritas anggaran pada program yang mendukung target utama	1. Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Analisis monitoring roadmap anggaran 3.Menghimpun daftar roadmap anggaran	Seluruh bidang/UPTD		
7	Membuat laporan kinerja berkala yang dibahas dalam forum pimpinan dan dimanfaatkan sebagai alat pengendalian organisasi agar laporan kinerja benar-benar menjadi	1. Menyusun mekanisme penyusunan laporan kinerja berkala (triwulan)	1. Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		https://drive.google.com/drive/folders/1tYAvKamCJbjnTug6Q9xPJ4SjN5wmZp?usp=drive_link
		2. Membahas laporan kinerja dalam forum pimpinan secara terjadwal	1. Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Seluruh bidang/UPTD	Selesai	

No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Langkah Kerja	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link G-Drive (https://bit.ly/TL-LHE-SAKIP2024)
	instrumen pengendalian organisasi;	3. Menetapkan langkah pengendalian organisasi berdasarkan hasil laporan	1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring secara berkala	Sekretaris Dinas		
		4. Mengintegrasikan hasil forum pimpinan ke dalam perbaikan pelaksanaan program/kegiatan	1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring secara berkala	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
8	Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja pada laporan kinerja, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan;	1. Membentuk tim penyusun laporan kinerja yang melibatkan pegawai lintas bidang 2. Menumbuhkan rasa memiliki melalui forum internal review laporan 3. Mendorong tanggung jawab bersama atas capaian kinerja organisasi 4. Langkah Tindak Lanjut	1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring secara berkala 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring secara berkala 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring secara berkala 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring secara berkala	Seluruh bidang/UPTD Seluruh bidang/UPTD Seluruh bidang/UPTD Sekretaris Dinas	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1nLhngs4VMzrhP5gpq0UU2i_KBN-tDq67?usp=drive-link
9	Memfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja;	1. Mengkaji hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan APIP 2. Peningkatan Efektivitas Kinerja	1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring secara berkala 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3. Melakukan monitoring secara berkala	Seluruh bidang/UPTD Sekretaris Dinas	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1nLhngs4VMzrhP5gpq0UU2i_KBN-tDq67?usp=drive-link

No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Langkah Kerja	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link G-Drive (https://bit.ly/TL-LHE-SAKIP2024)
		3.Mengkaji hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan APIP	1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Seluruh bidang/UPTD		
		4.Mengintegrasikan hasil evaluasi APIP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran	1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Sekretaris Dinas		
10	• Menyusun kebijakan terkait dengan pemberian reward and punishment terkait dengan pencapaian kinerja.	1. Menyusun konsep kebijakan reward and punishment berbasis kinerja 2. Menetapkan indikator dan kriteria pemberian reward and punishment 3. Menetapkan regulasi internal tentang reward and punishment 4.Mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh pegawai	1.Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Kasubbag Umum & Kepegawaian Kasubbag Umum & Kepegawaian Kasubbag Umum & Kepegawaian Kasubbag Umum & Kepegawaian	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1-fpSlAxuM9zqT9SlmoBJC8ehgPkPCHAd?usp=drive_link
	• Melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala menggunakan teknologi informasi.	1. Menyusun rencana evaluasi kinerja berkala berbasis teknologi informasi 2. Melakukan digitalisasi pengumpulan data capaian kinerja 3.Meningkatkan kapasitas pegawai dalam	1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala 1. Menyebarakan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretaris Dinas Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1nogGxwut5_dXI1jZbNemJaju7yqB9eVU?usp=drive_link

No.	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Langkah Kerja	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link G-Drive (https://bit.ly/TL-LHE-SAKIP2024)
		penggunaan teknologi evaluasi kinerja	kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Pelaporan		
		4. Melakukan penyempurnaan sistem evaluasi berbasis IT secara berkelanjutan	1. Menyebarkan nota dinas ke seluruh bidang dan UPTD 2.Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai 3.Melakukan monitoring secara berkala	Sekretaris Dinas		

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian penjelasan umum organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi, mandat kinerja, strategi OPD beserta dukungan SDM sarana-prasarana dan anggaran.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian ringkasan/ikhtisar indikator kinerja, strategi kebijakan dan program-kegiatan OPD serta perjanjian kinerja dan instrumen pendukung capaian kinerja tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi selama tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Tersebut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar nasional (jika ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Laporan Realisasi IKU
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menggambarkan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur Sumatera Selatan, di bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Visi Sumatera Selatan **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"** berada pada **Misi ke-2 (dua) dan ke-5 (lima):** *"Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat"* dan *"Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan"*. Visi dan misi ini mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dokumen penerus dari RJPD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut telah ditetapkan tujuan, sasaran beserta target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target kinerja Sasaran Pada Tahun:					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	1.Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah;	Rasio Kewirausahaan (2,83%)	%	2,57	2,60	2,65	2,70	2,83	2,83
		2.Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan;	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi (0,44%)	%	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44
		3.Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (0,85%)	%	0,53	0,58	0,64	0,70	0,77	0,85

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan lebih jelasnya dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** berikut:

Tabel 2. 2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah	Penguatan Ekosistem Kewirausahaan serta Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM	Akselerasi Penumbuhan Wirausaha Baru dan Peningkatan Skala Usaha UMKM melalui Ekosistem Terpadu
	Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Peningkatan Daya Saing dan Perluasan Akses Pasar UMKM melalui Inovasi, Digitalisasi, dan Standarisasi
	Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi		Modernisasi Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan Koperasi menuju Badan Usaha Profesional
	Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Mengedepankan Akuntabilitas dan Kinerja Optimal		Peningkatan Kapasitas Usaha dan Peran Ekonomi Koperasi dalam Rantai Pasok Daerah

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk memahami keterkaitan antara sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada

. Selain itu, hubungan antara sasaran dan indikator kinerja juga divisualisasikan dalam bentuk **pohon kinerja**, seperti yang ditampilkan pada .

Tabel 2. 3 Keterkaitan Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Indikator
1	Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
		<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	Jumlah wirausaha (sultan muda) sumsel
		Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
2	Meningkatnya skala dan	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Indikator
	kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan	<i>Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
		Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
3	Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam
		<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang difasilitasi izin
		Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi
		<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Pertumbuhan SHU Koperasi
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
		<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Pertumbuhan modal koperasi
		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif
		<i>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Persentase koperasi sehat
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
		<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1</i>	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Indikator
		<i>(satu) Daerah Provinsi</i>	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas
		<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi
		Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, dan restrukturisasi usaha	Kegiatan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha
		Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya
4	Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Mengedepankan Akuntabilitas dan Kinerja Optimal	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Tersedianya dukungan administrasi/layanan perkantoran
		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku
		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku
		<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya administrasi BMD perangkat daerah
		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah
		<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah
		<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Terselenggaranya pengadaan BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah
		<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Terselenggaranya layanan pemeliharaan BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah

2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja Perubahan dengan Gubernur Sumatera Selatan untuk mewujudkan target kinerja, yang dijabarkan dalam 8 Program yaitu: program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program pelayanan izin usaha simpan pinjam, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm), program pengembangan umkm, dengan total 14 kegiatan 32 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 15.338.717.956,-** (*Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*) dan Dana APBN sebesar **Rp. 25.553.254.000,-** (*Dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut ini :

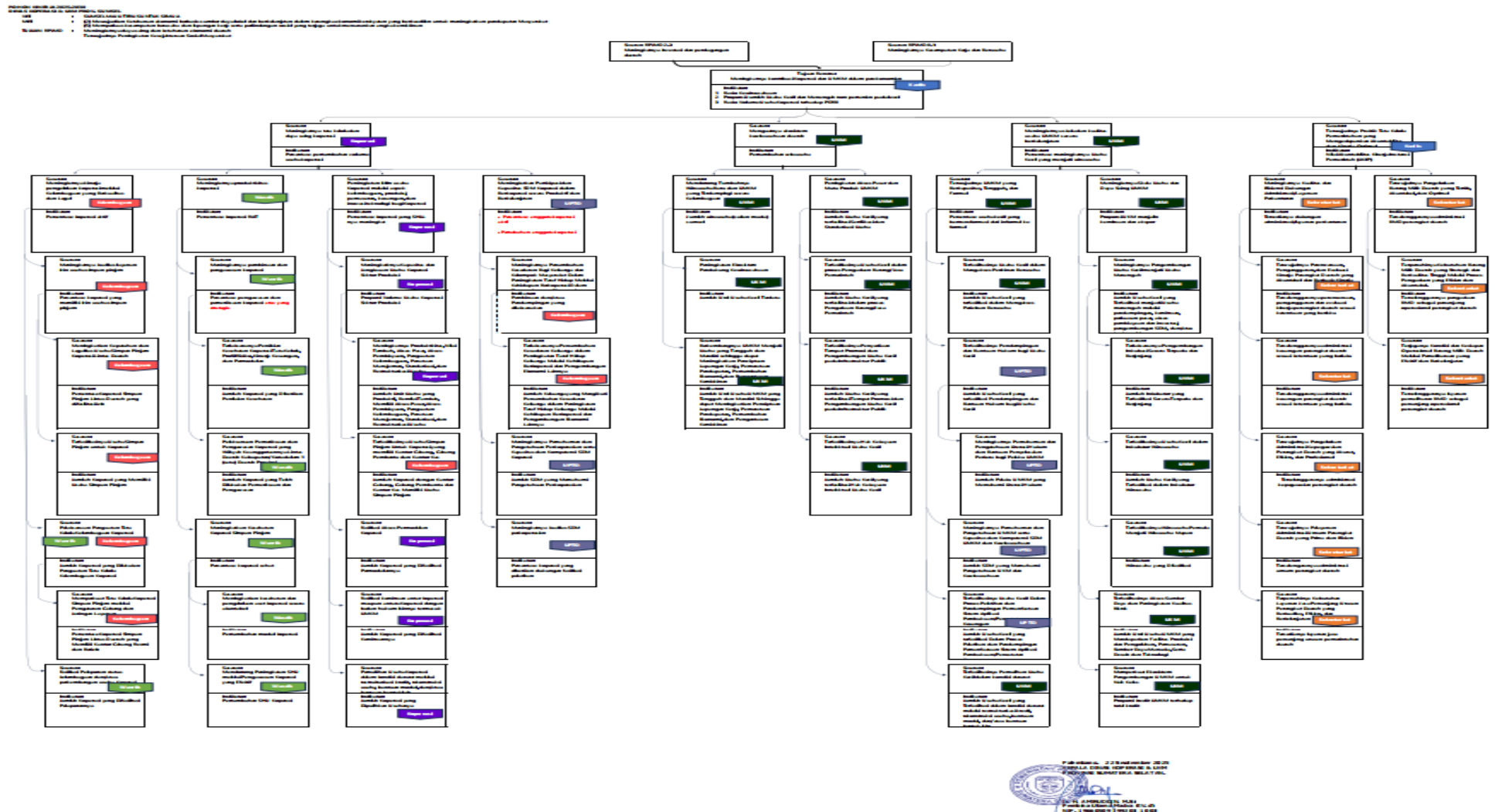
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Rasio Kewirausahaan	%	2,57
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,41
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,53

Tabel 2. 5 Dukungan Program dan Anggaran

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.717.695.856	APBD
2	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	46.000.000	APBD
3	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	81.700.000	APBD
4	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	39.050.000	APBD
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	235.370.000	APBD
6	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	416.444.000	APBD
7	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	197.452.350	APBD
8	Pengembangan UMKM	1.605.005.750	APBD
9	Perkoperasian	25.553.254.000	APBN
Jumlah APBD		15.338.717.956	
Jumlah APBN		25.553.254.000	
Total Anggaran		40.891.971.956	

Gambar 2. 1 Pohon Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi mengacu pada tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. Hal ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang disepakati sebelumnya. Capaian kinerja mencerminkan sejauh mana organisasi mampu mengelola sumber dayanya secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*). Hasil perbandingan ini dianalisis untuk mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Capaian kinerja dinas disajikan berdasarkan pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, yang dianalisis melalui pengukuran kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Metode analisis mencakup: (1) membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini; (2) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir; (3) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen rencana strategis organisasi; (4) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; (5) menganalisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, atau penurunan kinerja beserta solusi yang telah diambil; (6) menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya;

Dengan pendekatan ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat mengevaluasi kinerjanya secara komprehensif dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi: pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi.

Selain sebagai instrumen pertanggung jawaban pemerintah secara periodik, Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 juga sebagai media informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta produktivitas usaha koperasi di daerah.

Berikut ini penjabaran tentang analisis antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, capaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian menunjukkan hasil yang bervariasi pada masing-masing indikator kinerja.

Indikator Rasio Kewirausahaan mencapai realisasi sebesar 2,89% dari target 2,57% atau sebesar 112%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, yang mengindikasikan pertumbuhan kewirausahaan berjalan dengan baik.

Sebaliknya, indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non-Pertanian terhadap Total Usaha Provinsi terealisasi sebesar 0,30% dari target 0,41% atau sebesar 73%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi UMKM non-pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan target yang direncanakan.

Sementara itu, indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB mencapai realisasi sebesar 0,44% dari target 0,53% atau sebesar 83%. Hasil ini mengindikasikan bahwa peran koperasi dalam perekonomian daerah belum optimal dan masih memerlukan peningkatan.

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Rasio Kewirausahaan	%	2,57	2,89	112%
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,41	0,30	73%
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,53	0,44	83%

Secara umum, sebagaimana Tabel 3.1 Berdasarkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025, sasaran strategis meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian diukur melalui tiga indikator kinerja.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan satu indikator melampaui target dan dua indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.

3.2.1 Rasio kewirausahaan

A. Definisi Rasio kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan merupakan salah satu tolak ukur fundamental dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Sesuai dengan metodologi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional, indikator ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki usaha yang mempekerjakan buruh tetap dan dibayar dengan total angkatan kerja, yang datanya bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS. Peningkatan rasio ini secara langsung berkorelasi dalam upaya mewujudkan "UMKM Naik Kelas", karena setiap wirausaha yang mampu merekrut tenaga kerja formal akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Tujuan pengukuran Indikator Rasio Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam berwirausaha.
- Menjadi indikator pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, karena semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin besar kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.

Pengukuran indikator ini mengambil data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik. Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan final akan merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

Guna memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi Rasio Kewirausahaan di tingkat daerah, diperlukan identifikasi mendalam terhadap struktur populasi pelaku usaha yang menjadi basis perhitungan indikator tersebut. Peningkatan rasio ini secara langsung berkorelasi dengan upaya mewujudkan kebijakan strategis Gubernur Sumatera Selatan. di mana wirausaha yang mampu menyerap tenaga kerja formal akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi ekonomi kerakyatan.

Sebagai dasar pemetaan kekuatan ekonomi di 17 Kabupaten/Kota, berikut disajikan profil sebaran jumlah UMKM berdasarkan skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bersumber dari hasil Pendataan Lengkap KUMKM (SIDT-KUMKM) di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. 2 Jumlah UMKM per Wilayah per Skala Usaha di Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Skala Usaha			
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	KAB. OGAN KOMERING ULU	53.127	22	4	53.153
2	KAB. OGAN KOMERING ILIR	58.354	109	26	58.489
3	KAB. MUARA ENIM	84.730	62	13	84.805
4	KAB. LAHAT	45.723	346	48	46.117
5	KAB. MUSI RAWAS	34.554	103	2	34.659
6	KAB. MUSI BANYUASIN	46.728	58	11	46.797
7	KAB. BANYUASIN	72.535	123	21	72.679
8	KAB. OGAN ILIR	65.096	27	10	65.133
9	KAB. OKU TIMUR	76.334	448	67	76.849
10	KAB. OKU SELATAN	29.264	220	31	29.515
11	KAB. EMPAT LAWANG	31.778	110	9	31.897
12	KAB. PALI	17.031	107	11	17.149
13	KAB. MUSI RAWAS UTARA	20.639	75	12	20.726
14	KOTA PALEMBANG	167.442	241	62	167.745
15	KOTA PRABUMULIH	29.449	181	31	29.661
16	KOTA PAGAR ALAM	19.348	147	21	19.516
17	KOTA LUBUK LINGGAU	43.107	321	51	43.479
Jumlah		894.639	2.700	430	897.769

Sumber: SIDT KUMKM (Hasil Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM)

Target peningkatan jumlah total usaha mikro mencapai 894.639 unit (sekitar 99,6% dari total usaha), yang menunjukkan tantangan besar dalam transformasi menuju skala Kecil dan Menengah. Kota Palembang menjadi pusat populasi UMKM terbesar dengan total 167.745 unit, disusul oleh Kabupaten Muara Enim dan OKU Timur. Potensi Usaha Menengah Terdapat 430 unit usaha menengah yang menjadi motor utama dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas sesuai definisi rasio kewirausahaan.

B. Rumus Indikator Rasio kewirausahaan

Adapun rumus untuk menghitung Indikator Rasio kewirausahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kewirausahaan} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap}}{\text{Total angkatan kerja}} \times 100\%$$

C. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan penetapan PK Perubahan Tahun 2025, Realisasi atas target Kinerja indikator rasio kewirausahaan tahun 2025, yaitu:

Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Kewirausahaan	%	2,57	2,89	112

Pada tahun 2025, realiasi Indikator Rasio Kewirausahaan sebesar 2,89% dari target 2,57% atau tercapai sebesar 112%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, yang mengindikasikan pertumbuhan kewirausahaan berjalan dengan baik.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2022 s.d. 2025

Realisasi kinerja indikator rasio kewirausahaan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Variabel	2022	2023	2024	2025
Berusaha dibantu buruh tetap	105.224	138.924	116.932	134.800
Angkatan Kerja	4.497.960	4.588.170	4.659.809	4.664.935
Rasio Kewirausahaan	2,34%	3,03%	2,51%	2,89%

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelaku usaha yang dibantu buruh tetap mengalami peningkatan dari 105.224 unit pada tahun 2022 menjadi 134.800 unit pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024. Jumlah angkatan kerja juga menunjukkan tren meningkat dari 4.497.960 orang pada tahun 2022 menjadi 4.664.935 orang pada tahun 2025, dengan kenaikan signifikan pada tahun 2024. Sementara itu, rasio kewirausahaan berfluktuasi, dari 2,34% (2022) naik menjadi 3,03% (2023), kemudian turun menjadi 2,51% (2024), dan kembali meningkat menjadi 2,89% pada tahun 2025. Secara umum, perkembangan indikator menunjukkan hal yang positif, terutama pada peningkatan jumlah pelaku usaha dan rasio kewirausahaan pada tahun 2025.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Indikator Rasio kewirausahaan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Target Renstra 2025-2030 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Kewirausahaan	%	2,57	2,89	112%

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian Indikator Kinerja tahun 2025 adalah 2,89% dari target 2,57% atau dapat dikatakan persentase capaiannya adalah 112% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah baik meskipun tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pelaksanaan periode 5 tahun RPJMD dan Renstra 2025-2029.

F. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Standar Nasional

Adapun realisasi kinerja indikator rasio kewirausahaan di Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Realisasi SUMSEL dan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi SUMSEL	Realisasi NASIONAL
Berusaha dibantu buruh tetap	Orang	134.800	5.063.122
Angkatan Kerja	Orang	4.664.935	154.003.771
Rasio Kewirausahaan	%	2,89	3,29

Berdasarkan data di atas, rasio kewirausahaan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,89%, sedangkan realisasi nasional mencapai 3,29%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian rasio kewirausahaan di Sumatera Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar 0,40%. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan program pengembangan kewirausahaan, peningkatan jumlah wirausaha baru, serta optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan UMKM guna mendorong peningkatan rasio kewirausahaan agar lebih kompetitif dan mendekati capaian nasional.

- G. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, atau penurunan kinerja beserta solusi yang telah diambil

1. Analisis Capaian dan Tren Kinerja

Realisasi Indikator Rasio Kewirausahaan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mencapai 2,89%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,57% dengan persentase capaian kinerja sebesar 112%. Terdapat tren peningkatan positif sebesar 0,38% dibandingkan tahun 2024 (2,51%), yang didorong oleh kenaikan jumlah pelaku usaha dengan buruh tetap menjadi 134.800 unit.

2. Faktor Penyebab Keberhasilan (Success Factors)

Keberhasilan ini merupakan dampak langsung dari integrasi program kerja pada Bidang Pemberdayaan UKM dan UPTD Balatkop, dengan poin-poin kunci sebagai berikut:

- **Optimalisasi Program Sultan Muda:** Realisasi penciptaan wirausaha baru melalui program "Sultan Muda" mencapai 16.345 orang, melampaui target tahunan sebesar 15.000 orang.
- **Implementasi Strategi 7 Langkah (7-Steps):** Pendekatan sistematis mulai dari penumbuhan minat (*Awareness*) hingga pendampingan berkelanjutan telah memberikan struktur pengembangan UMKM yang lebih terukur.
- **Intervensi Teknis dan Stimulan:** Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan tematik bagi pemuda serta pemberian bantuan sarana usaha (mesin jahit dan mesin kopi) di 19 Kabupaten/Kota telah memperkuat basis operasional pelaku usaha untuk mulai mempekerjakan tenaga kerja tetap.

3. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Meskipun melampaui target daerah, capaian 2,89% masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 3,29% (selisih 0,40%). Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi transformasi UMKM dari sektor informal ke formal guna meningkatkan kontribusi terhadap rasio kewirausahaan nasional.

4. Solusi dan Rencana Tindak Lanjut: Kolaborasi Strategis Sultan Muda

Untuk mencapai target kumulatif 100.000 Sultan Muda dan mengejar ketertinggalan nasional, Dinas Koperasi dan UKM akan mengedepankan model Kolaborasi Pentahelix dalam setiap tahapan strategi 7 langkah:

- **Sinergi Akademisi dan Pendidikan (Awareness & Mindset):** Memperluas kerja sama dengan Universitas (seperti PGRI, MDP, dan Palcomtech) dan sekolah menengah untuk mengintegrasikan kurikulum kewirausahaan Sultan Muda, memastikan bibit wirausaha muncul sejak bangku pendidikan.
- **Kolaborasi Lintas Sektoral (Legal & Certification):** Berkoordinasi intensif dengan instansi terkait untuk mempercepat pemberian NIB, sertifikasi Halal (telah terealisasi 220 KBLI), dan izin PIRT, sehingga usaha mikro memiliki legalitas formal untuk mengakses pasar lebih luas.
- **Kemitraan Lembaga Keuangan (Financial Literacy & Capital):** Melibatkan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan dalam memberikan literasi keuangan dan akses permodalan bagi Sultan Muda yang telah melewati tahap kurasi.
- **Integrasi Teknologi dan Marketplace (Digital Technology):** Berkolaborasi dengan platform digital dan *marketplace* nasional untuk mengakselerasi digitalisasi UMKM, sehingga jangkauan pasar meningkat yang berimplikasi pada kebutuhan penambahan tenaga kerja tetap.
- **Pendampingan Berkelanjutan (Sustainable Business):** Melibatkan komunitas bisnis dan praktisi sebagai mentor dalam langkah ke-7 (*Sustainable*) untuk memastikan unit usaha yang terbentuk mampu bertahan jangka panjang dan terus naik kelas.

3.2.2 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Provinsi

- A. Definisi Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi

Indikator ini merupakan tolok ukur untuk memantau keberhasilan program pemerintah dalam mendorong transformasi UMKM dari skala mikro menjadi skala kecil dan menengah. Definisi indikator ini adalah perbandingan antara jumlah usaha kecil dan menengah dengan total keseluruhan UMKM (mikro, kecil, dan menengah) pada sektor non-pertanian. Peningkatan proporsi ini menjadi esensial untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional "UMKM Naik Kelas". Hal ini dikarenakan dominasi usaha mikro mengindikasikan kelemahan struktural, seperti keterbatasan sumber daya, produktivitas yang rendah, dan kerentanan terhadap gejolak ekonomi. Peningkatan proporsi ini secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

Tujuan Indikator Kinerja Utama Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi.

- Mendorong pertumbuhan UKM yang berdaya saing di bidang perdagangan, jasa, industri kreatif, dan manufaktur.
- Menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor non-pertanian.
- Meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDRB provinsi, sehingga memperkuat struktur ekonomi daerah.
- Memperluas basis ekonomi masyarakat dengan memperbesar proporsi pelaku usaha non-pertanian

Pengukuran indikator ini mengambil data dari SIDT-KUMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM, Kementerian UMKM Frekuensi data berupa tahunan.

B. Rumus Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah Non Pertanian Pada Level Provinsi

Adapun rumus untuk menghitung Indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi adalah sebagai berikut:

$$\text{Proporsi UK} = \frac{\text{Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$$

C. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan penetapan PK Perubahan Tahun 2025, Realisasi atas target Kinerja indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi tahun 2025, yaitu:

Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,41	0,30	73%

Pada tahun 2025, realiasi Indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi sebesar 0,30%dari target 0,41% atau tercapai sebesar 73%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja telah cukup baik walau belum melampaui target yang ditetapkan, yang mengindikasikan pertumbuhan kewirausahaan berjalan dengan baik.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2022 s.d. 2025

Realisasi kinerja indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

Variabel	2023	2024	2025
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian	2217	2213	2.700
Jumlah Unit Usaha	547.721	546.724	897.769
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	0,40%	0,40%	0,30%

Berdasarkan tabel perbandingan tahun 2023–2025, jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian relatif stabil pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebanyak 2.217 unit dan 2.213 unit, kemudian mengalami peningkatan menjadi 2.700 unit pada tahun 2025. Jumlah unit usaha secara keseluruhan juga menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 897.769 unit dibandingkan tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing sebesar 547.721 unit dan 546.724 unit. Sementara itu, proporsi UKM non pertanian pada level provinsi tercatat sebesar 0,40% pada tahun 2023 dan 2024, kemudian menurun menjadi 0,30% pada tahun 2025. Secara umum, perkembangan tahun 2025 menunjukkan peningkatan jumlah unit usaha dan UKM non pertanian, meskipun proporsinya terhadap total unit usaha masih perlu ditingkatkan.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan Target Renstra 2025-2030 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,41	0,30	73%

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian Indikator Kinerja pada Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi tahun 2025 adalah 0,30% dari target 0,41% atau dapat dikatakan persentasenya adalah 73% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah cukup baik walau memang belum mendapatkan tingkat kepuasan pada pencapaian, namun realisasi yang telah dilakukan sudah sangat signifikan.

F. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 Terhadap Standar Nasional

Adapun realisasi kinerja indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi tahun 2025 di Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 10 Tabel Perbandingan Realisasi SUMSEL dan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi SUMSEL	Realisasi NASIONAL
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	Unit	2700	26.710.000
Jumlah Unit Usaha	Unit	897.769	65.460.000
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,30	0,34

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Sumatera Selatan dan Nasional, Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun pelaporan tercatat sebesar 0,30%, sedangkan realisasi nasional mencapai 0,34%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi di Sumatera Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih hanya 0,04%. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan program pengembangan Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian, penin, serta optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan UMKM guna mendorong peningkatan Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian agar lebih kompetitif dan mendekati capaian nasional.

- G. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, atau penurunan kinerja beserta solusi yang telah diambil

1. Analisis Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Secara kuantitas, terdapat peningkatan yang signifikan pada jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non-Pertanian di Sumatera Selatan. Pada tahun 2025, jumlah UKM mencapai 2.700 unit, meningkat dari tahun 2024 yang berjumlah 2.213 unit. Hal ini menunjukkan bahwa program stimulus kewirausahaan yang selaras dengan kebijakan Gubernur Sumatera Selatan berjalan dengan baik dalam mendorong masyarakat untuk masuk ke sektor formal/produktif.

Peningkatan ini didorong oleh:

- **Optimalisasi digitalisasi UMKM** yang memudahkan akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
- **Efektivitas program pelatihan manajerial** dan teknis produksi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.
- **Sinergi lintas sektor** dalam mempermudah perizinan usaha di tingkat provinsi.

2. Analisis Kegagalan dan Penurunan Kinerja (Akar Permasalahan)

Meskipun jumlah unit usaha secara absolut meningkat, indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non-Pertanian menunjukkan angka 0,30%, yang mana angka ini di bawah target (0,41%) dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023-2024 (0,40%).

Faktor penyebab utama meliputi:

- **Pertumbuhan Total Unit Usaha yang Sangat Baik:** Penurunan proporsi ini disebabkan oleh penyebut (total unit usaha secara keseluruhan di Sumsel) yang melonjak tajam hingga mencapai **897.769 unit**. Pertumbuhan usaha mikro jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah.
- **Kesenjangan Standar Nasional:** Realisasi Sumsel (0,30%) masih di bawah rata-rata nasional (0,34%). Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing UKM di Sumatera Selatan masih menghadapi kendala pada aspek standarisasi produk dan sertifikasi (seperti sertifikasi Halal, BPOM, dan HAKI).
- **Keterbatasan Akses Pembiayaan:** Banyak usaha mikro yang kesulitan memenuhi persyaratan perbankan untuk melakukan ekspansi menjadi usaha kategori kecil/menengah.

3. Solusi dan Langkah Strategis ke Depan

Untuk mencapai target Renstra 2025-2030 dan menyelaraskan dengan visi Gubernur Sumatera Selatan dalam penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal dan UMKM, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil adalah:

A. Program Transformasi "Naik Kelas"

Dinas akan fokus pada program asistensi intensif bagi usaha mikro yang memiliki potensi tinggi untuk ditingkatkan skalanya menjadi usaha kecil. Hal ini dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan (*incubation*) bukan sekadar pelatihan sekali jalan.

B. Penguatan Akses Permodalan

Meningkatkan fasilitasi akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan optimalisasi peran lembaga keuangan mikro serta koperasi dalam menyalurkan modal kerja dengan bunga rendah bagi pelaku UKM non-pertanian.

C. Standardisasi dan Sertifikasi Produk

Memberikan subsidi atau fasilitasi pengurusan sertifikasi produk secara kolektif untuk memastikan produk UKM Sumsel mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional (ekspor), sehingga nilai tambah usaha meningkat.

D. Sinkronisasi Data Regional

Melakukan sinkronisasi data dengan kabupaten/kota secara berkala untuk memetakan persebaran UKM secara lebih akurat, sehingga intervensi program dapat dilakukan secara tepat sasaran berdasarkan klaster industri unggulan daerah.

Dinas koperasi dan UKM selalu berupaya dengan sangat baik untuk membantu dan mengarahkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat terus mengupgrade diri untuk lebih baik. Dapat kita lihat pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai sektor usaha dari mikro, kecil, dan menengah.

Tabel 3. 11 Jumlah UMKM per Sektor dan Skala Usaha di Sumatera Selatan

No.	Sektor Usaha	Skala Usaha			
		Mikro	Kecil	Menengah	Total
1	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	3.474	19	4	3.497
2	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	3.495	11	0	3.506
3	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.945	125	42	2.112
4	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	4.269	11	0	4.280
5	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	2.477	13	4	2.494
6	Pertambangan dan Penggalian	5.203	10	7	5.220
7	Real Estat	3.443	19	7	3.469
8	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.816	25	9	5.850
9	Konstruksi	9.235	48	16	9.299
10	Pendidikan	6.671	55	7	6.733
11	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lain	9.099	31	4	9.134
12	Informasi dan Komunikasi	13.208	20	6	13.234
13	Pengangkutan dan Pergudangan	45.836	58	10	45.904
14	Aktivitas Jasa Lainnya	44.307	80	13	44.400
15	Industri Pengolahan	93.141	126	25	93.292
16	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	134.948	185	27	135.160
17	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	508.072	1.864	249	510.185
JUMLAH		894.639	2.700	430	897.769

Sumber: SIDT KUMKM (Hasil Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM)

Berdasarkan data pada tabel 3.11, Sumatera Selatan memiliki total 897.769 UMKM, yang didominasi oleh usaha mikro sebanyak 894.639 (99,6%), sementara usaha kecil dan menengah masing-masing berjumlah 2700 (0,3%) dan 430 (0,04%). Dominasi usaha mikro yang sangat tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih beroperasi pada skala kecil dengan potensi pertumbuhan yang belum optimal. Oleh karena itu, mendorong usaha kecil untuk berkembang menjadi wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja formal dengan skema upah yang sesuai menjadi langkah strategis. Upaya ini tidak hanya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif serta berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Adapun kegiatan di Tahun 2025 yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi ini dari Bidang UKM di dinas Koperasi dan ukm sebagai berikut ini:

1. Pengembangan UMKM

- Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan melalui Entrepreneur Goes to Campus
- Bimbingan teknis bagi UMKM
- Young Entrepreneur Fest

- Kopi Sriwijaya Fest
- Entrepreneur Goes to Campus /Launching Sultan Muda Sumsel
- Pelatihan Management Pengawas Internal/Audit Internal Untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi

2. Program Pemberdayaan UMKM (Kemiskinan)

- Pelatihan Meracik Kopi Ala Barista

3.2.3 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

A. Definisi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB merupakan alat ukur vital yang dirancang untuk memantau kontribusi riil sektor koperasi terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Rasio ini didefinisikan sebagai perbandingan antara total volume usaha yang dihasilkan oleh koperasi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

1. Tujuan Indikator Kinerja Utama Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

- Mengukur kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah melalui perbandingan volume usaha koperasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- Meningkatkan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian dengan memperkuat posisi koperasi dalam struktur ekonomi daerah.
- Mendorong pertumbuhan usaha koperasi yang produktif dan berdaya saing, sehingga mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.

Pengukuran indikator ini mengambil data dari SIDT-KUMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM, Kementerian UMKM Frekuensi data berupa tahunan.

B. Rumus Perhitungan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

$$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$$

C. Target dan realisasi 2025 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Berdasarkan penetapan PK Perubahan Tahun 2025, Realisasi atas target Kinerja indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tahun 2025, yaitu:

Tabel 3. 12 Tabel Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,53	0,40	76%

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian Indikator Kinerja pada Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tahun 2025 adalah 0,40% dari target 0,53% atau dapat dikatakan persentase capaiannya adalah 76% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah cukup baik walau memang belum mendapatkan tingkat kepuasan pada pencapaian, namun realisasi yang telah dilakukan sudah sangat signifikan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2022-2025

Realisasi kinerja indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut.

Tabel 3. 13 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

Variabel	Satuan	2022	2023	2024	2025
Volume Usaha Koperasi	Rp	3.006	2.084	3.178	2910
PDRB ADHB	RP	590.079	629.168	663.961	720.210
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,51%	0,33%	0,48%	0,40%

Berdasarkan tabel perbandingan tahun 2022–2025, volume usaha koperasi mengalami fluktuasi, dari 3.006 pada tahun 2022 menurun menjadi 2.084 pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 3.178 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 2.910 pada tahun 2025. Sementara itu, PDRB ADHB menunjukkan tren meningkat dari 590,079 pada tahun 2022 menjadi 663,961 pada tahun 2024 dan relatif stabil pada tahun 2025. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB juga berfluktuasi, yaitu sebesar 0,51% (2022), turun menjadi 0,33% (2023), meningkat menjadi 0,48% (2024), dan kembali menurun menjadi 0,40% pada tahun 2025. Secara umum, kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB masih belum stabil dan memerlukan penguatan strategi pemberdayaan koperasi agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 14 Tabel Perbandingan Target Renstra 2025-2030 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,53	0,40	76%

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian Indikator Kinerja tahun 2025 adalah 0,40% dari target 0,53% atau dapat dikatakan persentase capaiannya adalah 76% dari target yang direncanakan, masih kurang dari total target yang diharapkan namun hasil sudah menunjukan keberhasilan yang cukup baik untuk persentase volume usaha koperasi terhadap PDRB.

F. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap standar nasional

Adapun realisasi kinerja indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tahun 2025 di Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 15 Tabel Perbandingan Realisasi SUMSEL dan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi SUMSEL	Realisasi NASIONAL
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,40	1,1

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Sumatera Selatan dan Nasional, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,40%, sedangkan capaian nasional sebesar 1,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB di Sumatera Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar 0,70%. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, khususnya dalam peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, dan perluasan pasar, guna mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah agar lebih kompetitif di tingkat nasional.

G. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, atau penurunan kinerja beserta solusi yang telah diambil

1. Analisis Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,40%. Meskipun secara persentase rasio terhadap PDRB mengalami fluktuasi, terdapat indikasi pertumbuhan positif pada nilai absolut PDRB ADHB yang terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 720.210 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi makro daerah terus berkembang secara positif.

Peningkatan nilai volume usaha koperasi secara nominal dibandingkan tahun 2023 (dari 2.084 menjadi 2.910 pada tahun 2025) merupakan hasil dari:

- **Fasilitasi Akses Permodalan:** Adanya dorongan program Gubernur dalam mempermudah akses kredit bagi koperasi produktif.
- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Pelatihan manajerial yang intensif untuk meningkatkan profesionalisme pengurus koperasi dalam mengelola volume usaha.

2. Analisis Kegagalan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan target yang telah ditetapkan, kinerja tahun 2025 mengalami beberapa catatan kritis:

- **Capaian Target Belum Optimal:** Realisasi sebesar 0,40% masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 0,53%, atau hanya mencapai tingkat kepuasan 76%.

- **Fluktuasi Kinerja:** Rasio tahun 2025 (0,40%) mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2024 yang sempat menyentuh angka 0,48%.
- **Kesenjangan Terhadap Standar Nasional:** Terdapat kesenjangan yang signifikan sebesar 0,70% antara realisasi Provinsi Sumatera Selatan (0,40%) dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 1,1%.

Akar Permasalahan:

- **Pertumbuhan PDRB melampaui Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi:** Pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi lain di Sumatera Selatan tidak disertai dengan akselerasi volume usaha koperasi yang setara, sehingga secara proporsional kontribusi koperasi terhadap PDRB cenderung menurun atau stagnan.
- **Keterbatasan Penetrasi Pasar:** Koperasi masih didominasi oleh sektor simpan pinjam, sementara sektor riil yang memiliki nilai tambah tinggi terhadap PDRB belum tergarap secara maksimal.
- **Daya Saing Rendah:** Kurangnya inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional koperasi menghambat ekspansi pasar di tingkat nasional.

3. Strategi dan Solusi Peningkatan Kinerja

Untuk mengatasi permasalahan di atas dan mencapai target Renstra 2025-2030, berikut adalah langkah-langkah solusi yang akan diambil:

A. Penguatan Koperasi Sektor Riil

Mendorong transformasi koperasi dari sekadar fungsi simpan pinjam menuju koperasi sektor riil (pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan) yang memiliki kontribusi langsung lebih besar terhadap pembentukan PDRB Sumatera Selatan.

B. Digitalisasi dan Modernisasi Koperasi

Mengakselerasi program "Koperasi Modern" melalui adopsi teknologi informasi dalam sistem manajemen dan pemasaran (e-commerce), guna meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar koperasi agar lebih kompetitif di tingkat nasional.

C. Perluasan Jejaring dan Kemitraan Strategis

Membangun sinergi antara koperasi dengan BUMD maupun sektor swasta besar dalam rantai pasok lokal. Hal ini bertujuan agar koperasi berperan sebagai agregator produk lokal Sumsel, yang secara otomatis akan meningkatkan volume usaha secara signifikan.

D. Optimalisasi Pendampingan dan Akses Permodalan

Meningkatkan intensitas pendampingan lapangan untuk memastikan bantuan digunakan untuk pengembangan usaha produktif, serta memfasilitasi sertifikasi produk agar memiliki standar kualitas nasional.

Persentase pertumbuhan omzet koperasi merupakan indikator penting keberhasilan sebuah koperasi. Angka ini mencerminkan kemampuan koperasi dalam meningkatkan pendapatannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan pengelolaan yang baik, strategi bisnis yang efektif, dan kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan

dinamika pasar. Namun, pertumbuhan yang negatif atau stagnan bisa menjadi sinyal adanya masalah internal atau eksternal yang perlu segera diatasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan kesehatan koperasi pada tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Cakupan Pemeriksaan: Dari total 7.932 unit koperasi aktif di Provinsi Sumatera Selatan, jumlah koperasi yang telah melalui proses diawasi dan diperiksa adalah sebanyak 548 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar koperasi aktif belum terjangkau oleh penilaian kesehatan formal pada periode laporan ini.
- Klasifikasi Tingkat Kesehatan: Hasil pemeriksaan terhadap 548 unit koperasi tersebut menghasilkan klasifikasi sebagai berikut:
 - Sehat: Sebanyak 216 unit koperasi dinyatakan dalam kategori sehat.
 - Cukup Sehat: Sebanyak 177 unit koperasi masuk dalam kategori cukup sehat.
 - Dalam Pengawasan: Terdapat 17 unit koperasi yang memerlukan pengawasan rutin.
 - Dalam Pengawasan Khusus: Terdapat 27 unit koperasi yang masuk dalam kategori pengawasan khusus untuk penanganan masalah yang lebih intensif.
- Distribusi Wilayah: Kota Palembang mencatat jumlah koperasi dengan predikat sehat terbanyak, yaitu 89 unit dari 144 koperasi yang diperiksa di wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Musi Rawas Utara, Pagar Alam, dan Banyuasin belum mencatatkan hasil pemeriksaan kesehatan pada tabel rekapitulasi ini.

Data ini menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan koperasi yang dinyatakan "Sehat" baru mencapai sekitar 2,7% dari total koperasi aktif (216 dari 7.932 unit). Kondisi ini memerlukan peningkatan intensitas pengawasan, evaluasi berkelanjutan, serta pendampingan manajerial agar koperasi di Sumatera Selatan dapat beroperasi secara sehat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar nasional.

Tabel 3. 16 Rekap Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Tahun 2025

No.	Kab/Kota	Koperasi Aktif	Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Skor Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi			
				Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus
1	KAB. MUSI RAWAS UTARA	241	-	-	-	-	-
2	KOTA PAGAR ALAM	90	-	-	-	-	-
3	KAB. BANYUASIN	537	1	-	-	-	-
4	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	319	-	-	-	-	-
5	KAB. LAHAT	537	20	-	18	2	-
6	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	578	37	23	14	-	-
7	KOTA LUBUK LINGGAU	217	15	13	2	-	-
8	KOTA PALEMBANG	989	144	89	47	1	7
9	KAB. EMPAT LAWANG	289	27	7	9	1	10
10	KAB. OGAN KOMERING ULU	414	-	-	-	-	-
11	KAB. MUARA ENIM	612	43	7	28	6	2

No.	Kab/Kota	Koperasi Aktif	Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Skor Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi			
				Sehat	Cukup Sehat	Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan Khusus
12	KAB. MUSI RAWAS	796	25	10	10	4	1
13	KAB. OGAN ILIR	409	4	2	2	-	-
14	KOTA PRABUMULIH	172	3	-	3	-	-
15	KAB. OGAN KOMERING ILIR	837	37	13	14	1	7
16	KAB. PALI	216	20	-	18	2	-
17	KAB. MUSI BANYUASIN	679	148	52	12	-	-
Jumlah		7.932	548	216	177	17	27

Sumber: Data diolah dari LHPKK Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Berdasarkan integrasi data antara kualitas kesehatan koperasi dan rasio volume usaha terhadap PDRB, dapat dirumuskan analisis sebagai berikut:

1. Dampak Rendahnya Kualitas Kelembagaan terhadap Kontribusi Ekonomi Realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 0,40% yang belum mencapai target 0,53% memiliki korelasi erat dengan kondisi kesehatan koperasi. Data menunjukkan bahwa dari 7.932 koperasi aktif, baru 216 unit (2,7%) yang dinyatakan Sehat. Rendahnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas ini menjadi faktor penghambat utama bagi koperasi untuk melakukan ekspansi usaha yang signifikan guna meningkatkan kontribusi terhadap PDRB daerah.

2. Ketimpangan Kinerja Antar Wilayah Terdapat korelasi positif antara aktivitas koperasi di wilayah dengan capaian volume usaha. Sebagai contoh:

- Kota Palembang yang memiliki tingkat pemeriksaan kesehatan tertinggi kedua setelah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu (144 unit diperiksa) sedangkan Kabupaten Musi Banyuasin sendiri sebanyak (148 Unit diperiksa) dan jumlah koperasi sehat terbanyak (89 unit dari kota Palembang) berkontribusi besar pada volume usaha, meskipun mengalami tantangan pertumbuhan omzet sebesar -25% akibat persaingan pasar yang tinggi di ibu kota.
- Sebaliknya, daerah dengan tingkat koperasi aktif yang rendah seperti Musi Rawas Utara (49,5%) juga menunjukkan pertumbuhan volume usaha yang negatif (-3%), yang diperparah dengan belum adanya data pemeriksaan kesehatan yang tervalidasi di wilayah tersebut.

3. Tantangan Struktural dan Operasional Penurunan pertumbuhan volume usaha secara total menjadi -11% pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa kendala kualitas yang ditemukan selama proses pengawasan:

- Banyak koperasi yang beroperasi tidak sesuai dengan izinnya dan rendahnya kesadaran terhadap tata kelola keuangan yang baik.
- Penyalahgunaan izin koperasi sebagai badan usaha yang tidak produktif mengakibatkan volume usaha tidak bergerak signifikan.

Untuk memperbaiki kinerja pada periode mendatang, langkah-langkah yang akan diambil adalah:

- Akselerasi Sertifikasi dan Kesehatan: Meningkatkan jumlah koperasi yang bersertifikasi dan sehat melalui program pengawasan ketat, agar koperasi memiliki legalitas dan kepercayaan untuk mengakses modal yang lebih besar.
- Penguatan Koperasi Merah Putih: Melanjutkan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pengurus (seperti di Banyuasin dan Prabumulih) untuk memperbaiki skor kesehatan koperasi dan efisiensi manajemen usaha.
- Modernisasi Berbasis Digital: Mendorong koperasi yang sudah masuk kategori "Sehat" dan "Cukup Sehat" untuk mengadopsi teknologi digital guna memperluas akses pasar, sehingga volume usaha meningkat dan mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.
- Fokus pada Sektor Riil: Mengarahkan pembinaan pada koperasi di sektor pertanian dan industri pengolahan yang memiliki nilai tambah tinggi terhadap PDRB Sumatera Selatan.

Persentase koperasi aktif merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat vitalitas dan keberlangsungan usaha dari seluruh koperasi yang ada dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Persentase ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan usahanya dengan total keseluruhan koperasi yang terdaftar secara resmi. Semakin tinggi persentase koperasi aktif, maka semakin banyak koperasi yang berkontribusi secara nyata dalam perekonomian dan menunjukkan kondisi sektor koperasi yang sehat dan dinamis. Untuk jumlah koperasi aktif dan tidak aktif dapat kita lihat pada tabel 3.17 berikut:

Tabel 3. 17 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Sumatera Selatan

No	Kota / Kabupaten	Koperasi (Unit)			% Aktif
		JML	Aktif	Tdk Aktif	
1	2	3	4	5	%
1	KAB. MUSI RAWAS UTARA	487	241	246	49,5%
2	KOTA PAGAR ALAM	148	90	58	60,8%
3	KAB. BANYUASIN	874	537	337	61,4%
4	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	488	319	169	65,4%
5	KAB. LAHAT	817	537	280	65,7%
6	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	855	578	277	67,6%
7	KOTA LUBUK LINGGAU	314	217	97	69,1%
8	KOTA PALEMBANG	1,376	989	387	71,87%
9	KAB. EMPAT LAWANG	361	289	72	80,1%
10	KAB. OGAN KOMERING ULU	513	414	99	80,7%
11	KAB. MUARA ENIM	752	612	140	81,4%
12	KAB. MUSI RAWAS	920	796	124	86,5%
13	KAB. OGAN ILIR	459	409	50	89,1%
14	KOTA PRABUMULIH	193	172	21	89,1%
15	KAB. OGAN KOMERING ILIR	909	837	72	92,1%
16	KAB. PALI	234	216	18	92,3%
17	KAB. MUSI BANYUASIN	683	679	4	99,4%
Jumlah		10.383	7.932	2.451	76,39%

Sumber: ODS per 31 Des 2025

Berdasarkan data tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.17, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 10.383 koperasi, dengan 7.932 (76,39%) di antaranya aktif dan 2.451 (23,60%) tidak aktif. Beberapa daerah mencatat kinerja baik, seperti Musi Banyuasin (99,4% aktif) dan Kabupaten Pali (92,3% aktif). Namun, daerah seperti Musi Rawas Utara (49,5% aktif), Pagar Alam (60,8% aktif), Banyuasin (61,4%) dan Ogan Komering Ilir (65,4% aktif) menghadapi tantangan serius dalam menjaga aktivitas koperasi. Palembang, sebagai ibu kota, memiliki koperasi terbanyak (1.376), dengan (71,87%) aktif. Secara umum, meskipun mayoritas koperasi masih beroperasi, diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan kinerja koperasi di daerah yang tertinggal dan mengurangi jumlah koperasi tidak aktif.

Pertumbuhan volume usaha koperasi di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang bervariasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.15 Secara keseluruhan, volume usaha koperasi mengalami penurunan menjadi -11%, dari Rp. 3,27 triliun menjadi Rp. 2,91 triliun. Beberapa daerah mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan kenaikan 51% dan Kabupaten Lahat 26%. Namun, beberapa daerah mengalami penurunan, seperti Kabupaten Muara Enim (-31%) Kota Banyuasin (-29%), dan Kota Palembang (-25%). Meskipun jumlah koperasi aktif bertambah dari 4.382 unit menjadi 7.932 unit, tantangan dalam pengelolaan usaha tetap terlihat di beberapa wilayah yang mengalami penurunan volume usaha.

Tabel 3. 18 Volume Usaha Koperasi di Sumatera Selatan

No	Kota / Kabupaten	Koperasi Aktif 2023	Koperasi Aktif 2024	Koperasi Aktif 2025	Volume Usaha 2023 (Rp Juta)	Volume Usaha 2024 (Rp Juta)	Volume Usaha 2025 (Rp Juta)	Persentase Pertumbuhan Vol. Usaha (%)
1	Kab. Ogan Komering Ulu	304	242	578	13.104	8.808	13.296	51%
2	Kab. Ogan Komering Ilir	479	492	837	470.793	1.267.115	1.255.616	-1%
3	Kab. Muara Enim	321	338	612	117.693	130.662	90.214	-31%
4	Kab. Lahat	162	149	537	39.684	32.206	40.615	26%
5	Kab. Musi Rawas	577	585	796	104.882	99.896	102.356	2%
6	Kab. Musi Banyuasin	395	408	679	54.737	49.504	57.815	17%
7	Kab. Banyuasin	182	197	537	115.974	543.097	388.037	-29%
8	Kab. Ogan Ilir	141	145	409	27.372	26.147	27.545	5%
9	Kab. OKU Timur	226	242	414	397.109	412.075	383.249	-7%
10	Kab. OKU Selatan	43	47	319	8.370	7.785	8.866	14%
11	Kab. Empat Lawang	125	127	289	1.131	2.063	2.065	0,1%
12	Kab. PALI	122	137	216	17.231	10.721	10.721	0%
13	Kab. Musi Rawas Utara	126	137	241	8.249	7.108	6.886	-3%
14	Kota Palembang	808	830	989	656.199	642.479	483.906	-25%
15	Kota Prabumulih	124	125	172	12.404	6.170	6.443	4%
16	Kota Pagar Alam	44	47	90	21.165	18.098	18.155	0,3%
17	Kota Lubuk Linggau	131	134	217	17.907	12.900	14.345	11%
Jumlah		4.310	4.382	7932	2.084.001	3.276.833	2.910.137	-11%

Sumber: ODS per 31 Des 2025

Target pertumbuhan omzet koperasi sumatera selatan tahun 2025 sebesar 16%, namun realisasi mencapai -11% atau (-70%) dari target, jauh berkurang dari tahun 2024 sebesar 16% dan tahun 2023 (-3,46%). Pencapaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan peningkatan produktivitas koperasi melalui penguatan akses pasar dan kemitraan dengan sektor swasta. Faktor Pendorong yang menyokong tercapainya indikator ini yaitu:

Pencapaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan peningkatan produktivitas koperasi melalui penguatan akses pasar dan kemitraan dengan sektor swasta.

Adapun kegiatan di Tahun 2025 yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator koperasi sehat ini dari berbagai bidang di dinas Koperasi dan ukm sebagai berikut ini:

H. UPTD Balai Pelatihan Koperasi UKM

- Pelatihan Kewirausahaan Dengan Tema” Membangun Jiwa Wirausaha Sultan Muda Kreatif, Inovatif, Dan Berdaya Saing Global.”
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Pengurus Koperasi Merah Putih
- Pelatihan Management Pengawas Internal/Audit Internal Untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Pengurus Koperasi Merah Putih Kabupaten Banyuasin
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Pengurus Koperasi Merah Putih Kota Prabumulih
- Pelatihan Management Pengawas Internal/Audit Internal Untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi Kota Palembang Angkatan I
- Pelatihan Management Pengawas Internal/Audit Internal Untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi Kota Palembang Angkatan Ii
- Pelatihan Management Pengawas Internal/Audit Internal Untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi Kota Palembang Angkatan Iii
- Pelatihan Peniingkatan Kompetensi Bagi Pengurus Koperasi Merah Putih

I. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- FGD Penerapan Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Tahun 2025
- Bimtek bagi Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan Koperasi Se-Sumsel
- Sosialisasi Uji Kelayakan dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Koperasi
- Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
- Sosialisasi Penilaian Mandiri bagi Koperasi

J. Bidang Pemberdayaan Koperasi

- Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

K. Bidang Kelembagaan Koperasi

- Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan izin berusaha dan perbaikan tata kelola KSP/USP
- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi

3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dalam penggunaan sumber daya tidak dapat dipisahkan dari konsep efektivitas. Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu keluaran dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, efisiensi anggaran merupakan salah satu tujuan utama dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, yang mencerminkan apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan harapan atau belum.

Dalam konteks manajemen sumber daya, ekonomi berfokus pada aspek input, efisiensi menitikberatkan pada proses dan output, sedangkan efektivitas berorientasi pada outcome atau hasil yang dicapai. Sebuah organisasi, program, atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang ditetapkan, atau dengan kata lain, dapat dikategorikan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya yang bijaksana (*spending wisely*).

Analisis Efektivitas Penyerapan anggaran:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan Anggaran

RA: Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja

Analisis Efisiensi Efisiensi anggaran:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } - i / RVK \text{ ke } - i}{PAK \text{ ke } - i / TVK \text{ ke } - i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

PAK : Pagu anggaran

RAK : Realisasi anggaran

TVK : Target keluaran

RAK : Realisasi keluaran

E : Efisiensi

n : jumlah keluaran

Dalam upaya pencapaian indikator Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan masih dibutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan diberbagai sisi, utamanya perubahan paradigma pegawai yang berorientasi anggaran menjadi berorientasi kinerja. Perlu juga upaya-upaya perbaikan perencanaan, penganggaran, kinerja pelayan, evaluasi dan monitoring. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan perlu berbenah diberbagai hal termasuk, pengadministrasian, pengarsipan, pengelolaan data dan pemerlihaaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran strategis terdiri atas Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UKM dalam Perekonomian yang memiliki 8 (delapan) program.

Tabel 3. 19 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Tiap Program

Sasaran Strategis	Program	Outcome	Keluaran		Anggaran		Efisiensi
			Target (TVK)	Realisasi (RVK)	PAK	RAK	
Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UKM dalam perekonomian	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri (%)	3%	1,69%	197.452.350	176.464.440,00	89,37
	Program Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiriProgram Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM (%)	41,00%	99,55%	1.605.005.750	1.567.523.762	97,66
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam (%)	26,23	140%	46.000.000	45.496.560	98,91
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi (%)	9,57%	1,01%	81.700.000	77.122.297	94,40
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi (%)	75,95%	101,00%	39.050.000	37.255.140	95,40
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian (%)	14,35%	1,68%	235.370.000	226.294.974	96,14
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi (%)	16,43%	0,88%	416.444.000	415.016.868	99,66
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Meningkatnya Kualitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi/Layanan Perkantoran (%)	100%	100%	12.717.695.856	11.731.815.365	92,25
Efisiensi Anggaran							95,48%
Efektivitas Penyerapan Anggaran							93,08%

Efisiensi pengelolaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan diukur pada tingkat capaian Sasaran Strategis, yang mana di tahun 2025 sudah menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien, sebagaimana disajikan pada tabel diatas dan dianalisis secara baik dengan penjelasan berikut.

3.2.5 Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran

A. Gambaran Umum Capaian Efisiensi

Secara makro, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik. Hal ini tercermin dari **Rata-rata Efisiensi Anggaran sebesar 95,48%** dan **Efektivitas Penyerapan Anggaran mencapai 93,08%**. Angka ini mengindikasikan bahwa instansi mampu mengoptimalkan penggunaan alokasi dana untuk mencapai output yang direncanakan dengan tingkat kebocoran atau pemborosan yang sangat minimal.

B. Analisis Perbandingan Output dan Realisasi Anggaran

Efisiensi dalam laporan ini diukur melalui rasio antara (RAK) terhadap (PAK). Berikut adalah rincian analisis pada beberapa program strategis:

- **Tingkat Efisiensi Tertinggi:** Dicapai oleh **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** dengan angka **99,66%**. Meskipun realisasi keluaran (RVK) hanya sebesar 0,88% dari target 16,43%, penyerapan anggaran yang sangat presisi menunjukkan bahwa penggunaan dana dilakukan secara sangat selektif dan terkontrol sesuai dengan tahapan kegiatan yang berjalan.
- **Optimalisasi Program Penunjang:** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki porsi anggaran terbesar (Rp 12,7 Miliar). Program ini berhasil mencapai **Efisiensi 92,25%** dengan tingkat **Realisasi Keluaran sempurna (100%)**. Ini membuktikan bahwa fungsi dukungan administrasi dan layanan perkantoran telah berjalan secara produktif dan ekonomis.

C. Evaluasi Hubungan Target Keluaran dan Penyerapan

Terdapat dinamika yang bervariasi antara pencapaian target fisik (Keluaran) dengan efisiensi anggaran:

- **Melampaui Target (Over-achievement):** Pada **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, realisasi keluaran mencapai **140%** dari target 26,23%, namun efisiensi anggaran tetap terjaga di angka **98,91%**. Hal ini menunjukkan adanya **efisiensi biaya per satuan output** (unit cost efficiency) yang sangat tinggi, di mana instansi mampu menghasilkan output lebih besar dengan sisa anggaran yang tetap minimal.
- **Akselerasi Program Pengembangan UMKM:** Program ini mencatatkan realisasi keluaran sebesar **99,55%** dari target 41,00% dengan tingkat efisiensi **97,66%**. Data ini menegaskan bahwa sumber daya dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendorong daya saing UMKM di Sumatera Selatan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi Laporan

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran pada seluruh program telah memenuhi prinsip **Ekonomis, Efisien, dan Efektif (3E)**. Nilai efisiensi yang rata-rata berada di atas 90% menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara akurat (presisi) dan pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

Catatan Strategis: Untuk periode mendatang, disarankan untuk melakukan evaluasi pada program dengan realisasi keluaran yang masih jauh dari target (seperti Program Pemberdayaan Koperasi), guna memastikan bahwa efisiensi anggaran yang tinggi juga berbanding lurus dengan percepatan capaian target fisik di lapangan secara tepat waktu.

3.2.6 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

A. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pencapaian efisiensi rata-rata sebesar **95,48%** dan efektivitas penyerapan **93,08%** dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci:

- **Ketepatan Perencanaan Anggaran:** Tingginya angka efisiensi pada sebagian besar program (rata-rata di atas 90%) menunjukkan bahwa proses penganggaran dalam PAK telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang riil, sehingga meminimalkan terjadinya anggaran yang tidak terpakai (*idle budget*).
- **Optimalisasi Biaya Operasional:** Pada **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, terjadi peningkatan kinerja yang sangat signifikan (Realisasi 140% dari target 26,23%). Hal ini disebabkan oleh adopsi sistem pelayanan yang lebih efektif atau integrasi layanan digital, sehingga mampu melampaui target fisik tanpa melampaui plafon anggaran (Efisiensi 98,91%).
- **Disiplin Pelaksanaan Anggaran Kas:** Realisasi RAK yang mendekati angka PAK menunjukkan kedisiplinan bendahara pengeluaran dan pejabat pembuat komitmen dalam mengeksekusi kegiatan sesuai dengan jadwal (SOP) yang telah ditetapkan.

B. Analisis Penyebab Kendala atau Penurunan Kinerja

Meskipun efisiensi anggaran sangat tinggi, terdapat beberapa catatan terkait capaian keluaran (output) pada program tertentu:

- **Kesenjangan Target dan Realisasi Fisik:** Pada **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)**, realisasi keluaran hanya mencapai 1,69% dari target 3%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau kendala dalam proses kurasi UMKM yang memerlukan waktu lebih lama dari estimasi awal.
- **Hambatan pada Program Sektoral:** **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** mencatat realisasi hanya 0,88% dari target 16,43%. Rendahnya capaian fisik ini meskipun anggaran terserap efisien (99,66%) mengindikasikan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan lapangan atau keterlambatan laporan dari pihak ketiga/mitra kerja.

C. Solusi yang Telah dan Akan Diambil

Menanggapi dinamika data tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil langkah-langkah strategis:

- **Re-evaluasi Standar Biaya:** Melakukan peninjauan kembali terhadap standar biaya umum untuk kegiatan yang melampaui target fisik secara drastis guna memastikan kualitas output tetap terjaga meskipun terjadi efisiensi biaya.
- **Sinkronisasi Pelaporan Fisik dan Keuangan:** Menyelaraskan sistem pelaporan antara progres fisik dan penyerapan keuangan agar tidak terjadi celah, jarak, atau kesenjangan yang lebar, sehingga efisiensi anggaran selalu berbanding lurus dengan kemajuan pekerjaan di lapangan.
- **Penguatan Pendampingan Lapangan:** Untuk program dengan realisasi rendah, dilakukan penguatan tim pendamping di tingkat kabupaten/kota untuk mempercepat validasi data sasaran (UMKM/Koperasi).

D. Rencana Tindak Lanjut (Follow-up)

Sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja instansi, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Akselerasi Program Strategis:** Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran (Early Procurement) untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun yang berisiko menurunkan kualitas efisiensi.
2. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** Melaksanakan rapat koordinasi pengendalian operasional secara bulanan untuk memantau program yang realisasi fisik-nya masih di bawah 50% dari target triwulanan.
3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Mengembangkan sistem *dashboard* pemantauan kinerja *real-time* yang menghubungkan realisasi RAK dengan capaian target keluaran (TVK/RVK) agar intervensi dapat dilakukan lebih dini jika terjadi deviasi kinerja.
4. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Melakukan bimbingan teknis bagi aparatur pengelola program mengenai manajemen risiko pembangunan untuk memitigasi faktor penghambat realisasi fisik di masa mendatang.

3.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian pernyataan kinerja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan UMKM serta penguatan koperasi telah dijalankan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan usaha kecil, akses permodalan, kemitraan, serta kualitas kelembagaan koperasi. Meskipun beberapa indikator menunjukkan pencapaian yang positif, terdapat pula tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam hal pertumbuhan wirausaha, peningkatan koperasi aktif, dan penguatan modal

koperasi. Analisis ini akan menguraikan sejauh mana keberhasilan atau kendala dari setiap program/kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan UMKM di daerah. Berdasarkan data kinerja tahun 2025, program ini menunjukkan hasil yang beragam. Indikator meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha mencapai 1,69%, sedikit di bawah target sebesar 3%. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan telah berjalan dengan baik. Namun, rasio kredit Jumlah wirausaha Sultan Muda terhadap total kredit mencapai 7.679 orang, hampir mencapai target sebesar 10.000, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses pemberdayaan UMKM.

2. Program Pengembangan UMKM

Program ini fokus pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Program ini menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator proporsi UMKM yang menjalin kemitraan dan ekspor ditargetkan sebesar 41,00% dan terealisasi sebesar 99,55%, yang berarti melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit ditargetkan sebesar 25,0% dan terealisasi sebesar 27,72%, menunjukkan kinerja yang melampaui target. Secara umum, program ini terlaksana efektif dengan dukungan realisasi anggaran yang optimal.

3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Pada program ini, persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam ditargetkan sebesar 26,23 dan terealisasi sebesar 140%, yang menunjukkan capaian sangat tinggi melebihi target. Untuk kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam lintas daerah, ditargetkan sebanyak 50 koperasi dan terealisasi sebesar 73%, yang menunjukkan sebagian besar target telah tercapai. Adapun kegiatan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas ditargetkan sebanyak 20 unit usaha dan terealisasi sesuai target. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi anggaran yang efisien dan mendukung pencapaian indikator.

4. Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Indikator persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi ditargetkan sebesar 9,57% dengan realisasi sebesar 1,01%, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Pada indikator pertumbuhan SHU koperasi yang ditargetkan sebesar 5%, realisasi tercatat sebesar -310%, menunjukkan penurunan signifikan dan belum memenuhi target kinerja. Secara umum, program ini belum mencapai hasil yang diharapkan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan.

5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini bertujuan untuk menilai kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam. Persentase koperasi aktif ditargetkan sebesar 75,95% dan terealisasi sebesar 101,00%, yang berarti melampaui target. Namun, pada indikator persentase koperasi sehat yang ditargetkan sebesar 5%, realisasi sebesar 2,31% masih berada di bawah target. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan capaian yang cukup baik pada aspek keaktifan koperasi, namun masih perlu peningkatan dalam aspek kesehatan koperasi.

6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perlindungan koperasi. Indikator persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ditargetkan sebesar 14,35% dengan realisasi sebesar 1,68%, sehingga belum mencapai target. Sementara itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi ditargetkan sebesar 5,0% dan terealisasi sebesar 8,63%, melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan fasilitasi pelatihan belum optimal, dampak terhadap partisipasi masyarakat cukup positif.

7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas ditargetkan sebesar 16,43% dan terealisasi sebesar 0,88%, sehingga belum mencapai target. Namun demikian, pada indikator proporsi volume usaha koperasi sektor produksi yang ditargetkan sebesar 8,9%, realisasi mencapai 50,00%, jauh melampaui target. Secara umum, program ini menunjukkan capaian yang beragam, dengan keberhasilan pada peningkatan volume usaha sektor produksi namun masih memerlukan penguatan dalam peningkatan kualitas koperasi.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyediaan dukungan administrasi dan layanan perkantoran. Pada Tahun 2025, indikator ketersediaan dukungan administrasi dan layanan perkantoran ditargetkan 100% dengan realisasi 83,33%, menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Realisasi kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah (BMD), administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan BMD rata-rata mencapai 83,33%, mencerminkan tata kelola administrasi yang cukup efektif dan sesuai ketentuan. Namun demikian, kegiatan administrasi kepegawaian belum terealisasi (0%) sehingga perlu menjadi perhatian untuk optimalisasi pada periode berikutnya. Secara umum, program ini telah mendukung operasional perangkat daerah secara cukup efektif, dengan tetap memerlukan peningkatan pada beberapa aspek guna mencapai target kinerja secara optimal.

Tabel 3. 20 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	3%	1,69%	197.452.350	176.464.440,00
		<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	Jumlah wirausaha (sultan muda) sumsel	10.000	7.679	197.452.350	176.464.440,00
		Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	41,00%	99,55%	1.605.005.750	1.567.523.762
		<i>Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	25,0%	27,72%	1.605.005.750	1.567.523.762
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	26,23	140%	46.000.000	45.496.560
		<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang difasilitasi izin	50	73%	46.000.000	45.496.560
		<i>Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah</i>	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang Memiliki Kantor Cabang Resmi dan Berizin	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	46.000.000	45.496.560
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	9,57%	1,01%	81.700.000	77.122.297
		<i>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah</i>	Pertumbuhan SHU Koperasi	5%	-310%	81.700.000	77.122.297

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		<i>Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>					
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	75,95%	101,00%	39.050.000	37.255.140
		<i>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Persentase koperasi sehat	5%	2,31%	39.050.000	37.255.140
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	14,35%	1,68%	235.370.000	226.294.974
		<i>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi (%)	5,0%	8,63%	235.370.000	226.294.974
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	16,43%	0,88%	416.444.000	415.016.868
		<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	8,9%	50,00%	416.444.000	144.676.413
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Tersedianya dukungan administrasi/layanan perkantoran	100%	83,33%	12.717.695.856	9.159.117.508
		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	83,33%	126.150.000	85.978.415
		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100	83,33%	9.679.141.000	7.129.267.582

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
			sesuai ketentuan yang berlaku				
		<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya administrasi BMD perangkat daerah	100	83,33%	253.350.000	253.330.004,00
		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	0%	0	0,00
		<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100	83,33%	970.221.000	737.877.056
		<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	83,33%	615.200.000	455.508.206
		<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Terselenggaranya layanan pemeliharaan BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah	100	83,33%	1.073.633.856	497.156.245

Tabel 3.20 program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa program seperti Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi serta Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi berhasil melampaui target, sementara program lainnya seperti Pengembangan UMKM dan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian masih perlu peningkatan. Evaluasi dan perbaikan terhadap program yang belum mencapai target diperlukan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

3.2.8 Analisis Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 21 Perbandingan Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2025)	Rata- rata Realisasi sampai dengan tahun ini (2025)	Tingkat Kemajuan /Capaian
1	2	3	4	5
Rasio Kewirausahaan	%	2,57	2,89	112%
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,41	0,30	73%
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,53	0,44	83%

Berdasarkan data capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2025, dilakukan perbandingan antara realisasi yang telah dicapai dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra). Analisis ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program kerja dalam mencapai visi dan misi organisasi pada periode berjalan.

Secara umum, gambaran capaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kewirausahaan

Indikator Rasio Kewirausahaan menunjukkan hasil yang **sangat signifikan dan melampaui target**.

- **Target:** 2,57%
- **Realisasi:** 2,89%
- **Capaian:** 112%

Analisis: Capaian sebesar 112% ini menunjukkan bahwa program penumbuhan wirausaha baru serta penguatan ekosistem kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan berjalan sangat efektif. Angka realisasi 2,89% yang berada di atas target menandakan adanya peningkatan gairah masyarakat dalam berwirausaha serta keberhasilan fasilitasi pemerintah dalam mempermudah akses legalitas formal maupun perizinan usaha bagi para pelaku usaha pemula.

2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non-Pertanian

Indikator ini mengukur keberadaan UKM di sektor sekunder dan tersier pada level provinsi.

- **Target:** 0,41%
- **Realisasi:** 0,30%
- **Capaian:** 73%

Analisis: Capaian indikator ini tercatat sebesar 73%, yang dikategorikan dalam **target yang masih dalam proses pemenuhan**. Meskipun terdapat pertumbuhan secara nominal, namun realisasi sebesar 0,30% belum mencapai target optimal 0,41%. Hal ini mengindikasikan perlunya akselerasi pada program diversifikasi usaha non-pertanian.

Tantangan yang dihadapi kemungkinan besar terkait dengan ketergantungan struktur ekonomi daerah pada sektor basis (pertanian), sehingga transisi menuju sektor UKM pengolahan atau jasa memerlukan intervensi yang lebih masif dalam hal pelatihan keterampilan teknis dan bantuan alat produksi.

3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Indikator ini mencerminkan kontribusi ekonomi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

- **Target:** 0,53%
- **Realisasi:** 0,44%
- **Capaian:** 83%

Analisis: Tingkat capaian sebesar 83% menunjukkan kinerja yang **cukup baik namun memerlukan optimalisasi**. Kontribusi koperasi sebesar 0,44% terhadap PDRB menunjukkan bahwa koperasi telah memainkan peran dalam roda ekonomi daerah, namun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan (0,53%). Diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan modernisasi koperasi agar volume usaha dapat meningkat, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap struktur ekonomi makro di Sumatera Selatan.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Secara keseluruhan, dari ketiga indikator utama yang dievaluasi hingga tahun 2025, satu indikator telah melampaui target (Rasio Kewirausahaan), sementara dua indikator lainnya berada pada rentang capaian 73% hingga 83%.

Rekomendasi Strategis:

1. **Mempertahankan Momentum:** Melanjutkan program pendampingan wirausaha guna menjaga tren positif rasio kewirausahaan.
2. **Akselerasi Sektor Non-Pertanian:** Meningkatkan insentif dan kemudahan akses pasar bagi UKM di sektor industri kreatif, jasa, dan pengolahan untuk mengejar ketertinggalan target proporsi UKM non-pertanian.
3. **Digitalisasi Koperasi:** Mendorong digitalisasi pada sistem manajerial koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan volume transaksi usaha guna meningkatkan kontribusi terhadap PDRB daerah.

3.2.9 Analisis Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Periode RENSTRA

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya, mengalami peningkatan atau fluktuasi yang sangat menggembirakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Selatan, baik dari semua sektor bidang. Sedangkan capaian secara keseluruhan pada tahun 2024 juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 22 Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Terhadap IKU Pada Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	20	18	20	20	-	-	-	-
	Jumlah UMKM Naik Kelas	UMK	500	575	500	526	-	-	-	-
Meningkatnya laju dan produktivitas koperasi	Persentase volume usaha koperasi	%	2	-			-	-	-	-
	Persentase pertumbuhan modal koperasi	%	2	5.2	2	25.3	-	-	-	-
Meningkatnya jaringan dan produktivitas UKM	Persentase pertumbuhan omset UKM	%	10	2.6	10	3.65	-	-	-	-
	Jumlah kenaikan wirausaha baru	UKM	350	328	350	201	-	-	-	-
Menigkatnya ekonomi kerakyatan (maju ekonomi kerakyatan)	Persentase pertumbuhan modal koperasi	%	2	5.2	2	25.3	-	-	-	-
	Jumlah kenaikan wirausaha baru	UKM	UKM	350	328	350	-	-	-	-
	Persentase meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	1	2.8	1	270	-	-	-	-
	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	1	6.8	1	1	-	-	-	-
	Persentase kenaikan volume koperasi	%	2	-	2	-	-	-	-	-
	Persentase kenaikan omset UMKM	%	10	2.6	10	3.65	-	-	-	-
	Jumlah koperasi aktif	Unit	20	18	20	20	-	-	-	-
	Jumlah UMKM naik kelas	Unit	500	575	500	526	-	-	-	-
	Jumlah koperasi sehat	UMK	20	11	20	20	-	-	-	-
	Meningkanya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	-	-	-	-	3.0	2.96	-	-
	Rasio Kewirausahaan	%	-	-	-	-	3,14	3.09	-	-
	Persentase Koperasi Aktif	%	-	-	-	-	66,20	61	-	-
	Persentase Pertumbuhan Omzet koperasi	%	-	-	-	-	16	60.73	-	-
	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	%	-	-	-	-	3,93	4.06	-	-

	Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Serta Penyediaan Makan dan Minum									
	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	%	-	-	-	-	5	7.42	-	-
Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Rasio Kewirausahaan	%	-	-	-	-	3,14	3,09	2,57	2,89
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	-	-	-	-	-	-	0,41	0,30
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	-	-	-	-	-	-	0,53	0,44

Berdasarkan data Tabel 3.22 mengenai Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, berikut adalah Analisis Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan;

1. Ringkasan Capaian Kinerja Strategis

Secara umum, realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi yang dinamis sepanjang periode RENSTRA, khususnya pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), terlihat adanya nilai positif pada aspek kualitas koperasi dan pertumbuhan kontribusi ekonomi, meskipun terdapat tantangan pada beberapa indikator pertumbuhan volume usaha dan produktivitas UKM.

2. Analisis Perbandingan dan Realisasi Indikator

- **Penguatan Kapasitas Koperasi dan UKM:** Indikator jumlah koperasi aktif dan UMKM naik kelas menunjukkan pencapaian yang stabil. Pada tahun 2025, persentase koperasi berkualitas mencapai **7,42%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **5%**. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembinaan kelembagaan berjalan efektif dalam meningkatkan status kesehatan koperasi.
- **Rasio Kewirausahaan:** Indikator Rasio Kewirausahaan pada tahun 2025 tercapai sebesar **3,09%** dari target **3,14%**. Meskipun sedikit di bawah target, angka ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga ekosistem kewirausahaan di Sumatera Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 (2,57%) dan 2023 (2,89%), terdapat kenaikan signifikan yang mencerminkan keberhasilan program inkubasi bisnis.
- **Pertumbuhan Ekonomi Sektor:** Kontribusi PDRB Sub Sektor Perdagangan dan Makan Minum mencatatkan realisasi **4,06%**, melampaui target **3,93%**. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa UKM sektor riil memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat dalam mendukung struktur ekonomi makro daerah.

- **Tantangan pada Produktivitas:** Terdapat gap pada indikator pertumbuhan omzet UKM dan volume usaha koperasi pada periode awal RENSTRA yang memerlukan akselerasi lebih lanjut guna memastikan dampak ekonomi langsung terhadap kesejahteraan anggota dan pelaku usaha.

3. Upaya-Upaya yang Telah dan Harus Dilakukan

Untuk mempertahankan nilai positif dan memperbaiki indikator yang belum mencapai target maksimal, langkah-langkah strategis yang diimplementasikan meliputi:

- **Modernisasi Koperasi:** Transformasi koperasi konvensional menuju koperasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi manajemen.
- **Pendampingan UMKM Terpadu:** Melakukan kurasi produk UMKM untuk menembus pasar ekspor serta fasilitasi sertifikasi (Halal, PIRT, HAKI) guna meningkatkan nilai jual produk lokal.
- **Penguatan Akses Pembiayaan:** Memperluas akses kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan untuk mengatasi kendala permodalan.

4. Tindak Lanjut dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut, direkomendasikan beberapa poin tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Digitalisasi:** Mendorong seluruh koperasi aktif untuk mengadopsi sistem pelaporan keuangan berbasis aplikasi guna mempermudah pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi secara *real-time*.
2. **Fokus Sektor Non-Pertanian:** Meningkatkan proporsi UMKM non-pertanian di level provinsi melalui pelatihan keterampilan teknis dan manajerial pada sektor industri kreatif dan jasa.
3. **Sinkronisasi Data:** Memperkuat basis data tunggal (Single Database) UMKM untuk memastikan penyaluran bantuan dan program bantuan teknis tepat sasaran (by name by address).

5. Pemanfaatan Peran Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM berperan strategis sebagai *regulator* sekaligus *fasilitator* dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemanfaatan fungsi dinas akan dioptimalkan melalui penyediaan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) yang lebih proaktif, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global di Provinsi Sumatera Selatan.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mencapai 93,07% dari total pagu anggaran sebesar Rp.15.338.717.956,00, dengan realisasi sebesar Rp.14.276.989.406,00. Sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp.1.061.728.550,00. Pada belanja operasi, realisasi mencapai 92,7% dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.026.824.148,00. Belanja pegawai mencatat realisasi sebesar 90,88%, sedangkan belanja barang dan jasa mencapai 96,35%. Untuk belanja modal, realisasi

mencapai 96,83 %, dengan belanja modal peralatan dan mesin mencapai 99,99% dan belanja modal gedung dan bangunan mencapai 94,74%. Secara keseluruhan, penyerapan anggaran APBD seperti terlihat pada **Error! Reference source not found.**21 menunjukkan kinerja yang baik, terutama pada belanja modal yang hampir mencapai 100%.

Tabel 3. 23 Rekapitulasi Realisasi Anggaran APBD

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
TOTAL BELANJA	15.338.717.956,00	14.276.989.406,00	1.061.728.550,00	93,08
BELANJA OPERASI	14.237.684.100,00	13.210.859.952,00	1.026.824.148,00	92,79
Belanja Pegawai	9.262.561.000,00	8.417.437.617,00	845.123.383,00	90,88
Belanja Barang Jasa	4.975.123.100,00	4.793.422.335,00	181.700.765,00	96,35
BELANJA MODAL	1.101.033.856,00	1.066.129.454,00	34.904.402,10	96,83
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	438.350.000,00	438.311.504,00	38.496,00	99,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	662.683.856,00	627.817.950,00	34.865.906,10	94,74

Realisasi anggaran APBN untuk Program Perkoperasian 81.37% dari pagu anggaran sebesar Rp.25.553.254.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.20.793.880.111,00. Sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp.4.759.373.889,00. Capaian ini menunjukkan bahwa program-program yang didanai oleh APBN telah berjalan dengan sangat efektif, dengan penyerapan anggaran yang hampir mencapai 100% seperti tertuang pada tabel 3.21 Hal ini mencerminkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program-program kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi.

Tabel 3. 24 Rekapitulasi Realisasi Anggaran APBN

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Program Perkoperasian	25.553.254.000,00	20.793.880.111,00	4.759.373.889,00	81,37%

Berdasarkan Tabel Perubahan Anggaran APBD Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, total belanja mengalami peningkatan sebesar Rp6.049.499.844, dari semula Rp21.388.217.800 menjadi Rp27.437.717.644. Kenaikan anggaran tersebut terutama didorong oleh peningkatan Belanja Operasi sebesar Rp4.456.464.900, yang mencakup kenaikan Belanja Barang dan Jasa, meskipun terjadi penurunan pada Belanja Pegawai. Selain itu, Belanja Modal juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.593.034.944, yang difokuskan pada penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Perubahan anggaran ini mencerminkan penyesuaian kebijakan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 25 Perubahan Anggaran APBD 2025

URAIAN	Induk	Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
TOTAL BELANJA	21.388.217.800,00	15.338.717.956,00	6.049.499.844
<i>BELANJA OPERASI</i>	<i>18.694.149.000,00</i>	<i>14.237.684.100,00</i>	<i>4.456.464.900</i>
- Belanja Pegawai	8.054.737.000,00	9.262.561.000,00	-1.207.824.000
- Belanja Barang Jasa	10.639.412.000,00	4.975.123.100,00	5.664.288.900
<i>BELANJA MODAL</i>	<i>2.694.068.800,00</i>	<i>1.101.033.856,00</i>	<i>1.593.034.944</i>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.400.000.000,00	438.350.000,00	961.650.000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.294.068.800,00	662.683.856,00	631.384.944
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0

Secara umum, realisasi anggaran APBD dan APBN tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik, dengan penyerapan anggaran yang tinggi, terutama pada belanja modal dan program-program yang didanai oleh APBN. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran, terutama pada belanja barang dan jasa. Perubahan anggaran yang terjadi juga mencerminkan penyesuaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Secara rinci, realisasi pelaksanaan anggaran di masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada APBD 2025 dapat diuraikan dalam tabel 3.24 dan tabel 3.25 berikut. Hal ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang bagaimana alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta capaian kinerja yang dihasilkan.

Tabel 3. 26 Realisasi Anggaran tiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (100%)	12.717.695.856	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp.11.731.815.365 atau 92,25% dengan sisa pagu anggaran Rp.985.880.491	100% pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan (100%)	126.150.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.126.099.795 atau 99,96% dengan sisa pagu anggaran Rp.50.205	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja terselenggara 100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersedia (5 Dok)	126.150.000	Realisasi penyusunan dokumen perencanaan daerah Sub Kegiatan Sebesar Rp.126.150.000 atau 99,96% dengan sisa pagu anggaran Rp.50.205 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	5 Dokumen Perencanaan tersedia
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%)	9.679.141.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.9.679.141.000 atau 90,90% dengan sisa pagu anggaran Rp. 845.123.383	100 administrasi keuangan perangkat daerah terpenuhinya
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji & tunjangan ASN yang dibayarkan (14 Bulan)	9.262.561.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 9.679.141.000 atau 90,90% dengan sisa pagu anggaran Rp.8.798.683.617 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	14 bulan gaji dan tunjangan ASN dibayar
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13 Bulan	404.100.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.404.100.000 atau 91,26% dengan sisa pagu anggaran Rp.368.766.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	13 bulan gaji Non ASN dibayarkan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium penata usahaan keuangan (12 Bulan)	12.480.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp. 12.480.000 atau 99,99% dengan sisa pagu anggaran Rp1.800 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	12 Bulan Honorarium penatausahaan keuangan dibayar
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya adm keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan (100%)	970.221.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.12.480.000 atau 99,5% dengan sisa pagu anggaran Rp.4.748.995	100 adm keuangan perangkat daerah terselenggara
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor (12 Bulan)	25.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.25.000.0000 atau 99,31% dengan sisa pagu anggaran Rp.172.500 dan Realisasi Fisik sebesar	komponen instalasi listrik disediakan selama 12 bulan

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
				100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor (12 Bulan)	199.700.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.199.700.000 atau 99,8% dengan sisa pagu anggaran Rp303.500 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor (12 Bulan)	233.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 233.000.000 atau 99,97% dengan sisa pagu anggaran Rp66.100 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	ATK dan makan minum rapat tersedia selama 12 bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bahan cetak dan penggandaan (12 Bulan)	40.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.40.000.000 atau 99,96% dengan sisa pagu anggaran Rp. 16.500 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	bahan cetak dan penggandaan tersedia 12 Bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (30 laporan)	392.521.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.392.521.000 atau 98,93% dengan sisa pagu anggaran Rp29.404 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terpenuhi selama 12 bulan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (1 dokumen)	80.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.80.000.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp.80.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD perangkat daerah terpenuhi 100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%)	253.350.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.253.350.000 atau 99,99% dengan sisa pagu anggaran Rp0 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	100% pemenuhan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Tersedia (1 PAKET)	253.350.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.253.350.000 atau 99,61% dengan sisa pagu anggaran	1 paket mebel disediakan

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
				Rp.253.350.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (100%)	615.200.000	Realisasi Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp.615.200.000 atau 95,84% dengan sisa pagu anggaran Rp.825.590.779	jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia 100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jumlah Surat Terkirim dan Materai Tersedia (12 Bulan)	12.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.12.000.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp.12.000.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Tersedianya Jumlah Surat Terkirim dan Materai Tersedia (12 Bulan)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan jasa umum kantor (12 Bulan)	287.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.287.000.000 atau 93% dengan sisa pagu anggaran Rp. 19.963.130 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Internet, air dan listrik tersedia selama 12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Jumlah Frekuensi Pembayaran Jasa Pelayanan Kantor Terbayar (12 bulan)	316.200.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.316.200.000 atau 98,22% dengan sisa pagu anggaran Rp1.615.685	Jasa sopir, kebersihan dan keamanan tersedia selama 12 bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan dinas terpelihara (12 Bulan)	1.073.633.856	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.1.073.633.856 atau 93% dengan sisa pagu anggaran Rp. 75.013.133 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara 100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peralatan dan mesin yang terpelihara (12 Bulan dan 25 unit)	330.950.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.330.950.000 atau 87,87% dengan sisa pagu anggaran Rp.40.144.927 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	kendaraan dinas terpelihara dengan baik selama 12 bulan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (12 Bulan 20 Unit)	80.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.80.000.000 atau 99,99% dengan sisa pagu anggaran Rp.2.300 dan Realisasi Fisik sebesar	peralatan dan mesin kantor terpelihara selama 12 bulan

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
				100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 unit)	662.683.856	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp.662.683.856 atau 94,74% dengan sisa pagu anggaran Rp.34.865.906	1 gedung kantor dipelihara
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM (100%)	46.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.46.000.000 atau 98,91% dengan sisa pagu anggaran Rp.503.440	98,91% koperasi diawasi dan diperiksa
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (73%)	46.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.46.000.000 atau 98,91% dengan sisa pagu anggaran Rp.503.440	Terpenuhinya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (20 Unit)	46.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.46.000.000 atau 98,91% dengan sisa pagu anggaran Rp.503.440	Terpenuhinya fasilitas izin usaha di daerah sebanyak 20 unit usaha
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan (100%)	81.700.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp19.978.570 atau 99,89% dengan sisa pagu anggaran Rp21.430	9,57% koperasi diperiksa kesehatannya
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	81.700.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.81.700.000 atau 94,40% dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.577.703 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	10 unit koperasi dinilai kesehatannya
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh,	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (10 unit)	81.700.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.81.700.000 atau 94,40% dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.577.703 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	10,99% modal sendiri tumbuh

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
	serta Akuntabel				
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (100%)	39.050.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.39.050.000 atau 95,4% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.794.860	75,95% SDM koperasi mendapat pelatihan teknis dan manajerial
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (100%)	39.050.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.39.050.000 atau 95,4% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.794.860	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah sebesar 2,31%
	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktivitas Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (14 unit)	39.050.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.39.050.000 atau 95,4% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.794.860	20 Koperasi dinilai kesehantanya
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Modal Koperasi (14,35%)	235.370.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.235.370.000 atau 96,14% dengan sisa pagu anggaran Rp. 9.075.026dan Realisasi Fisik sebesar 100%	44.3% pertumbuhan modal koperasi adalah modal sendiri dari total volume usaha
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota (100%)	235.370.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.235.370.000 atau 96,14% dengan sisa pagu anggaran Rp. 9.075.026dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terpenuhinya target Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 100%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (25 orang)	235.370.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.235.370.000 atau 96,14% dengan sisa pagu anggaran Rp. 9.075.026dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terpenuhinya target sebanyak 25 orang

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi Aktif 76,39%	416.444.000	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp.416.444.000 atau 99,66% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.427.132	Koparasi Aktif (76,39%
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (100%)	416.444.000	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp.416.444.000 atau 99,66% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.427.132	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (100%)
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Koperasi yang difasilitasi penguatan kelembagaan (24 Unit Usaha)	51.920.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.51.920.000 atau 99,55% dengan sisa pagu anggaran Rp.236.100 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terpenuhinya target sebanyak 24 unit usaha
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (24 keluarga)	28.000.000	Realisasi Keuangan Program Sebesar Rp.28.000.000 atau 97,06% dengan sisa pagu anggaran Rp. 825.000	Terpenuhinya jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup sebanyak 24 keluarga atau sebesar 97,06%
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (40 Unit Usaha)	214.300.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp.214.300.000 atau 99,87% dengan sisa pagu anggaran Rp.269.500	Terlaksananya fasilitas kemitraan koperasi sebanyak 40 Unit Usaha
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah	Koperasi yang diperdayakan (40 Unit Usaha)	122.224.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.122.224.000 atau 99,92% dengan sisa pagu	Terpenuhinya target sebanyak

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			anggaran Rp. 97.032 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	pemberdayaan koperasi sampai 99,92%
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (3%)	197.452.350	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.197.452.350 atau 89,37% dengan sisa pagu anggaran Rp.20.987.910 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Usaha Kecil yang menjadi wirausah (1,69%)
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan (100%)	197.452.350	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.197.452.350 atau 89,37% dengan sisa pagu anggaran Rp.20.987.910 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terealisasinya penyelenggaraan pemberdayaan UMKKM 89,37%
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	"Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan" (100 unit usaha)	84.002.350	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.84.002.350 atau 90,44% dengan sisa pagu anggaran Rp.8.034.540 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terpenuhinya jumlah Masyarakat kurang mampu yang dibina menjadi wirausaha baru sebanyak 100 unit usaha
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (25 orang)	45.370.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.45.370.000 atau 98,28% dengan sisa pagu anggaran Rp.778.370 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	25 UMKM mengikuti sosialisasi literasi hukum
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (220 Unit Usaha)	68.080.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.68.080.000 atau 82,12% dengan sisa pagu anggaran Rp. 12.175.000 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Terealisasinya UMKM yang terfasilitasi sebanyak (220 Unit Usaha)
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Kewirausahaan (2,57%)	1.605.005.750	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.1.605.005.750 atau 97,66% dengan sisa pagu anggaran Rp.37.481.988 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Rasio Kewirausahaan sumsel (2,89%)

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	PAGU	Realisasi	Keterangan
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase pertumbuhan wirausaha (5,42%) Jumlah UMKM Sumatera Selatan (897.769 UMKM)	1.605.005.750	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.1.605.005.750 atau 97,66% dengan sisa pagu anggaran Rp.37.481.988 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	Realisasi Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 27,72%
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (150 Unit Usaha)	1.605.005.750	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp.1.605.005.750 atau 97,66% dengan sisa pagu anggaran Rp.37.481.988 dan Realisasi Fisik sebesar 100%	544 Unit Usaha mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
TOTAL ANGGARAN			15.338.717.956	Realisasi Keuangan Sebesar Rp14.276.989.406 atau 93,08% dengan sisa pagu anggaran Rp1.061.728.550	

Tabel 3. 27 Realisasi Anggaran tiap Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2025 Satker Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	25.553.254.000	20.727.982.111	81,12%	4.825.271.889
EB Program Perkoperasian	25.553.254.000	20.727.982.111	81,12%	4.825.271.889
EB.2726 Dukungan Pemberdayaan Pemberdayaan Koperasi di Daerah	25.553.254.000	20.727.982.111	81,12%	4.825.271.889
BDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	7.146.000.000	6,901,950,000	96.58 %	244,050,000
BDF.002 Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	7.146.000.000	6,901,950,000	96.58 %	244,050,000
052 Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	7.146.000.000	6,901,950,000	96.58 %	244,050,000
DCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	17,202,658,000	12,703,763,809	73.85 %	4,498,894,191
DCF.001 Pelatihan Kompetensi dan Talenta	17,202,658,000	12,703,763,809	73.85 %	4,498,894,191
051 Peningkatan Kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	13,510,824,000	9,385,144,066	69.46 %	4,125,679,934
052 Peningkatan Kompetensi Pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	3,691,834,000	3,318,619,743	89.89 %	373,214,257
FAD Perencanaan dan Penganggaran	1,204,596,000	1,122,268,302	93.17 %	82,327,698
FAD.001 Perencanaan Kementerian Koperasi di Daerah	1,204,596,000	1,122,268,302	93.17 %	82,327,698
051 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan di Daerah	1,204,596,000	1,122,268,302	93.17 %	82,327,698

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021 – 2026 dan RENSTRA Dinas dan UKM Tahun 2025 - 2029. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

Sebagai instansi pelayanan publik Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sepenuhnya melayani masyarakat, telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Sehingga sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

Tabel 4. 1 Ketercapaian target dan realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Rasio Kewirausahaan	%	2,57	2,89	112%
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,41	0,30	73%
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,53	0,44	83%
Rata-rata					89,3

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari persentase tingkat pencapaian indikator sasaran dan realisasi anggaran seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

4.2 Tinjauan Keberhasilan

Pada tahun 2025 pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil dengan pencapaian kinerja yang maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- **Rasio Kewirausahaan (Capaian: 112% - Sangat Berhasil)**
 - **Analisis:** Indikator ini melampaui target (2,89% dari target 2,57%). Keberhasilan ini dipicu oleh peningkatan signifikan jumlah wirausaha yang mampu mempekerjakan buruh tetap (134.800 orang), menunjukkan kualitas kewirausahaan di Sumatera Selatan naik kelas dari sekadar usaha mandiri menjadi penyedia lapangan kerja.
 - **Tindak Lanjut:** Mempertahankan tren positif dengan memperluas akses pemodal dan pendampingan ekspor agar wirausaha mapan tersebut dapat melakukan ekspansi pasar yang lebih luas.
- **Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (Capaian: 83% - Cukup Berhasil)**
 - **Analisis:** Realisasi sebesar 0,44% menunjukkan volume usaha koperasi (Rp2,91 Triliun) belum tumbuh secepat pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Meskipun secara nominal besar, kontribusi relatifnya menurun dibandingkan tahun 2024 akibat dinamika ekonomi makro yang lebih cepat dari pertumbuhan internal koperasi.
 - **Tindak Lanjut:** Melakukan revitalisasi koperasi melalui digitalisasi manajemen dan mendorong pembentukan "Koperasi Modern" yang berbasis sektor riil (produksi) untuk meningkatkan nilai tambah usaha.
- **Proporsi UKM Non-Pertanian Level Provinsi (Capaian: 73% - Kurang Berhasil)**
 - **Analisis:** Indikator ini mencatat capaian terendah (0,30% dari target 0,41%). Meski jumlah UKM Non-Pertanian meningkat menjadi 2.700 unit, namun persentasenya mengecil karena terjadi lonjakan drastis pada jumlah total unit usaha (denominator) yang mencapai 897.769 unit. Hal ini mengindikasikan banyaknya muncul usaha baru berskala mikro, namun sangat sedikit yang berhasil naik kelas ke skala Kecil dan Menengah.
 - **Tindak Lanjut:** Fokus pada program "UMKM Naik Kelas" melalui fasilitasi sertifikasi produk (Halal, BPOM, HAKI) dan standarisasi kualitas agar usaha mikro memiliki legalitas dan kapasitas untuk bertransformasi menjadi usaha kecil/menengah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk memperbaiki capaian rata-rata sebesar **89,3%** agar menjadi 100% di tahun berikutnya, berikut adalah langkah strategis yang disarankan:

1. **Akselerasi Transformasi Formal:** Mengingat banyaknya jumlah unit usaha namun minim yang mencapai skala UKM, Dinas perlu memperkuat pelayanan terpadu untuk kemudahan izin berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro.
2. **Sinergi Data Makro:** Melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala untuk memantau fluktuasi PDRB dan jumlah unit usaha agar target tahunan lebih presisi dan responsif terhadap kondisi lapangan.
3. **Penguatan Koperasi Sektor Riil:** Mengalihkan fokus dari koperasi simpan pinjam ke koperasi sektor produksi (perkebunan, perikanan, industri kreatif) yang memiliki dampak langsung lebih besar terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

4.4 Rekomendasi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam upaya pemenuhan capaian target sasaran di akhir RPD, diperlukan langkah-langkah sebagaimana dalam **Error! Reference source not found.** berikut ini.

Tabel 4. 2 Rekomendasi Peningkatan Kinerja

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Sebagian pengurus koperasi masih belum memahami pengelolaan manajerial koperasi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.	Memberikan pendidikan dan pelatihan manajerial agar kompetensi pengurus dalam mengelola koperasi lebih meningkat.
2.	Masih ada koperasi yang belum patuh terhadap peraturan perkoperasian baik aspek prinsip koperasi, aspek kelembagaan, aspek legalitas formal sebagai landasan dalam pengelolaan koperasi maupun aspek usaha serta transaksi.	Meberikan pemahaman terhadap pengurus koperasi akan kewajibannya sebagai pengurus dan melakukan monitoring terhadap koperasi aktif yang belum melaksanakan Rapat Tahunan Anggota.
3.	Masih banyak koperasi aktif akan tetapi tidak melakukan Rapat Tahunan Anggota (RAT) sebagai satu kewajiban pengurus koperasi.	Memberikan pemahaman prinsip-prinsip koperasi terhadap anggota koperasi bahwa koperasi dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotongroyong untuk bersama-sama memberikan manfaat baik secara lembaga maupun individu.
4.	Permodalan yang dimiliki koperasi yang terbatas ditambah kesadaran anggota koperasi masih rendah akan kewajiban sebagai anggota koperasi sehingga berpengaruh pada pengembangan usaha koperasi.	Peningkatan usaha koperasi dengan melakukan pendampingan dengan stockholder seperti Diskop, UKM Provinsi Sumatera Selatan.
5.	Terbatasnya pemasaran dan distribusi produk-produk UMKM dan koperasi.	Peningkatan kemitraan koperasi dengan lembaga perbankan dalam peningkatan modal usaha koperasi serta mebuca jalur informasi, distribusi dan pemasaran dengan pengusaha local seperti Grab, dan Bank sebagai mitra telah memberikan kesempatan untuk menggelar produk produk UMKM dan koperasi di Sumatera Selatan.
6.	Masih kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi kesehatan (PIRT) dan HALAL dalam pencapaian kualitas produk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran.	Memfasilitasi pelaku usaha dengan sosialisasi serta bimbingan teknis terhadap pelaku usaha akan pentingnya Sertifikasi Kesehatan (PIRT) dan HALAL.

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut
7.	Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan rendahnya motivasi dalam kewirausahaan sehingga pelaku UMKM kesulitan dalam menjalankan usaha terutama dalam memasarkan produknya ditambah dengan banyaknya produk produk luar yang masuk dengan kualitas produk sama dengan harga yang lebih murah.	Memberikan bimbingan, pelatihan serta pendampingan bagi pelaku UMKM dari mulai kualitas, kuantitas bahkan sampai pemasaran produk; Memfasilitasi pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produknya melalui event-event pameran ataupun dengan ataupun dengan pemasaran Online dengan memanfaatkan sosialmedia bahkan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan lainnya seperti misalnya pusat oleh-oleh maupun melalui mini market-mini market yang sudah banyak tersebar di setiap daerah; Menyediakan tempat berupa outlet-outlet yang strategis untuk menampung dan memasarkan produk-produk UMKM.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang serta dapat memberikan gambaran Kinerja organisasi kepada pihak-pihak terkait ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif untuk membangun Sumatera Selatan.